



2021



SILVER WINNER  
PRIA AWARD  
2021

## PENDIDIKAN UNTUK PERUBAHAN



**4**

BPK Corpu Jawaban Tantangan Pengembangan SDM

**21**

BPK Temukan 23 Permasalahan Program Indonesi Pintar

**38**

WTP tak Berarti Bebas Masalah



**T**anggal 2 Mei merupakan hari lahir Ki Hadjar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Karenanya, setiap 2 Mei kemudian ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk memperingati kelahiran dan menghormati jasa pencetus Taman Siswa tersebut.

Kutipan Ki Hadjar Dewantara yang terkenal yakni “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”. Artinya, “di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik; di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan ide dan prakarsa; di belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan serta arahan”.

Semasa hidupnya, Ki Hadjar Dewantara tak pernah berhenti untuk belajar. Apalagi zaman terus mengalami perubahan. Semangat ini yang kami angkat dalam *Warta Pemeriksa* edisi Mei 2021 ini. Semangat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong dan mengembangkan pendidikan untuk mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi. Hal ini juga yang menjadi perhatian BPK ketika mengembangkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menjadi BPK Corporate University (BPK Corpu).

Hal ini sebagai bentuk ciri khas lembaga yang berkembang maju. Yaitu lembaga memiliki satuan pendidikan yang menjamin peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam rubrik Sorotan, kami memaparkan dengan jelas mengenai lembaga yang telah diresmikan pada 8 April 2021 tersebut. Harapannya, kehadiran BPK Corpu dapat menjawab tantangan pengembangan SDM pada masa kini dan mendatang.

Semangat untuk meningkatkan kualitas dan mengikuti perubahan juga diwujudkan dengan komitmen untuk memperluas kiprah di dunia internasional. Tekad itu antara lain dibuktikan dengan meningkatkan kemampuan para pegawai BPK dalam berbahasa asing selain bahasa Inggris.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti mengatakan, pentingnya memiliki pegawai yang mampu berbahasa asing non-Inggris sudah disadari BPK sejak 2005. Kebutuhan memiliki pegawai yang mampu berbahasa asing selain bahasa Inggris semakin penting mengingat BPK kian aktif di banyak organisasi internasional. Kiprah BPK di dunia internasional saat ini tak hanya di kalangan lembaga pemeriksa, melainkan juga di organisasi internasional yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Semangat menyikapi perubahan juga yang menjadi dasar *Warta Pemeriksa* untuk lebih menekankan pada format *e-magazine* mulai edisi Juni 2021. Dengan begitu, edisi Mei ini menjadi yang terakhir *Warta Pemeriksa* menyapa pembaca sekalian dalam format cetak.

Melalui edisi ini, redaksi berharap bahwa kita semua dapat terus belajar dan menjadi lebih baik setiap harinya. Sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan bangsa yang cerdas, maju, dan sejahtera. Selamat Hari Pendidikan Nasional. ●

---

## TIM EDITORIAL

### Pengarah

Agung Firman Sampurna  
Agus Joko Pramono  
Bahrullah Akbar  
Bahtiar Arif

### Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

### Ketua Tim Redaksi

Dian Rosdiana

### Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

### Sekretariat

Bestantia Indraswati  
Klara Ransingin  
Ridha Sukma  
Sigit Rais  
Frenny Artiningrum S  
Apriyana  
Sudarman

### Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI  
Jalan Gatot Subroto no 31  
Jakarta  
Telepon: 021-25549000  
Pesawat 1188/1187  
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id  
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh  
Sekretariat Jenderal  
Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

---

Pemeriksa BPK dilarang  
meminta/menerima uang/  
barang/fasilitas lainnya dari  
pihak yang terkait dengan  
pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018  
tentang Kode Etik BPK)

- 
- 4 BPK CORPU JAWABAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM
  - 6 MEMPERLUAS KIPRAH DENGAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA
  - 8 PEGAWAI BPK AKTIF MELATIH BAHASA PRANCIS
  - 9 MENINGKATKAN PROFESIONALISME DENGAN KEMAMPUAN BAHASA ARAB
  - 10 MODUL KONSOLIDASI TINGKATKAN KUALITAS LHP LKPP
  - 13 VENDOR BERMASALAH, PRODUKSI MIGAS TERHAMBAT
  - 15 PENERAPAN *E-GOVERNMENT* KURANG EFEKTIF



## 17 MENJAWAB PERTANYAAN MASYARAKAT ATAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Pemeriksaan ini dapat membantu pemerintah agar bisa melakukan penyesuaian dan perbaikan sembari penanganan pandemi Covid-19 tetap berjalan.

- 
- 19 KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUMAH SUSUN TAK SINKRON
  - 21 BPK TEMUKAN 23 PERMASALAHAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
  - 23 MERAH MAGISTER LEWAT *E-LEARNING*
  - 24 SAMPAIKAN HASIL PEMERIKSAAN IAEA, BPK PASTIKAN LAYANAN TERBAIK



- 
- 26 WAKIL KETUA BPK IKUTI SERANGKAIAN DISKUSI DI PERTEMUAN UN IAAC KE-54
  - 27 BPK SAMPAIKAN DUA ISU PENTING TERKAIT LHP AUDITOR EKSTERNAL PBB
  - 28 ADI SUDIBYO, KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ADAPTIF DENGAN LINGKUNGAN 40 TEROBOSAN ALA BPK SUMSEL
  - 32 MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DENGAN *STAKEHOLDER*
  - 34 MELINDUNGI PEGAWAI DENGAN TABUNGAN PNS
  - 36 MEMASAK BUTUH KETEKUNAN
  - 38 WTP TAK BERARTI BEBAS MASALAH
  - 40 BPK AJAK AKADEMISI LAKUKAN RISET KEUANGAN NEGARA
  - 42 BPK MATANGKAN PENYUSUNAN BUKU "MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA PASCA COVID-19"
  - 44 BPK AJAK PEMANGKU KEPENTINGAN BAHAS PELUANG PJJ UNTUK ASN
  - 46 PENYAJIAN INFORMASI BEBAN PENANGANAN PANDEMI COVID, POSISI UTANG, DAN KEBERLANGSUNGAN FISKAL PADA LK 2020 PEMERINTAH FEDERAL AS
  - 56 BERITA FOTO

## BPK CORPU JAWABAN TANTANGAN PENGEMBANGAN SDM

Sebanyak 70 persen kurikulum BPK Corpu berupa *on the job training*.

**S**alah satu ciri khas lembaga yang berkembang maju adalah memiliki satuan pendidikan yang menjamin peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini juga yang menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengembangkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara menjadi BPK Corporate University (BPK Corpu).

BPK Corpu telah diresmikan pada 8 April 2021. Kehadiran BPK Corpu diyakini dapat menjawab tantangan pengembangan SDM di masa kini dan masa mendatang.

Plt. Kepala Badiklat BPK Ida Sundari mengatakan, target dari pengembangan SDM dalam BPK Corporate University adalah setiap pegawai BPK. Apalagi, BPK saat ini memiliki banyak pegawai muda. Untuk mengikuti perubahan, maka kehadiran BPK Corpu dibutuhkan agar bisa menghasilkan diklat yang singkat dan bermanfaat.

"Terlebih di masa pandemi seperti ini, diperlukan pola pendidikan dan latihan yang berbeda. Sehingga kehadirannya diharapkan mampu melakukan pelatihan tidak hanya praktik namun juga teori. Corporate University akan fokus pada *learning anywhere and everywhere*," tutur dia kepada *Warta Pemeriksa*, belum lama ini.

Ida menjelaskan, pengembangan Corporate University ada dalam rencana strategis BPK 2020-2024, yaitu pada Strategi IV. Strategi IV menyebutkan "Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara".

Berdasarkan strategi itu disebutkan bahwa kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan SDM yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Diklat diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfa-

silitasnya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi peserta pasca-diklat, dan implementasi materi diklat pada organisasi sehingga kinerja BPK semakin baik.

"BPK berusaha mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara yang berlaku untuk internal organisasi dan eksternal baik skala nasional maupun global," ucap dia.

Tak hanya berdasarkan Renstra, Rapat Kerja BPK juga meminta adanya Corporate University. Dalam raker pun disebutkan bahwa perlu ada transformasi pembelajaran dari Badiklat PKN menuju Corporate University. "Berdasar renstra dan arahan pimpinan, maka tugas kami dalam hal pengembangan pembelajaran lewat pendidikan dan pelatihan amat mendukung lahirnya Corporate University, karena kelahirannya ini memang tugas dan tanggung jawab badiklat," tutur dia.

Untuk melahirkan BPK Corporate University, pihaknya sudah melakukan pengembangan kompetensi, pengembangan individu bagi tiap satuan kerja dan menciptakan program pembelajaran yang relevan dan sesuai corporate university. Harapannya, tutur dia, pengembangan yang dilakukan bisa mendorong peningkatan kinerja organisasi.

"Kami juga sudah membuat One page explain comprehensively (OPEC), dimana isinya menjelaskan kegiatan-kegiatan yang ada di Corporate University. Berdasar OPEC itu kami menjadikan sebuah *road map* dan inisiatif strategis untuk membangun corporate university ke depan," ucap dia.

Dalam membangun BPK Corporate University, Badiklat sebelumnya juga sudah melakukan kajian dan *benchmarking* ke beberapa kementerian dan lembaga serta BUMN. Sementara hingga *launching*, Badiklat juga menyiapkan sarana dan prasarana khususnya terkait Informasi dan teknologi.

"Intinya diharapkan di 2022 sudah me-



■ Ida Sundari



**BPK berusaha mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara yang berlaku untuk internal organisasi dan eksternal baik skala nasional maupun global.**

lakukan kegiatan dan di 2023 kami sudah terdaftar di Global Council of Corporate Universities,” ucap dia.

Ida menambahkan, sebenarnya kehadiran BPK Corpu tidak membangun dari awal, karena Badiklat sudah memiliki program pendidikan. Sehingga pihaknya tinggal mengembangkan, menyempurnakan dan menyesuaikan dengan prinsip Corpu.

Untuk saat ini, selain inovasi yang dikembangkan, pihaknya juga mengusulkan setiap

satuan kerja di BPK mengirimkan satu ahli atau *expert*. Sehingga dibentuk *pool expert* yang dengan keahliannya diharapkan bisa menciptakan kurikulum dan melatih rekan sejawatnya di satker yang bersangkutan.

### **Kurikulum**

Untuk kurikulum, ucap dia, saat ini sudah menggunakan prinsip corporate university dengan prinsip 10-70-20. 10 persen belajar mandiri, 70 persen melakukan *on the job training* dimana mereka diterjunkan langsung dalam satuan kerja dan terakhir 20 persen pendampingan dari pelatih atau mentor.

Ida menambahkan, Badiklat dalam upaya menuju BPK Corpu juga melakukan transformasi digital. Sebelum menjadi BPK Corpu, bahkan saat masih pusdiklat, transformasi informasi dan digital sudah dilakukan. Badiklat sudah memanfaatkan sembilan aplikasi, terkait media komunikasi, koresponden kegiatan yang dilakukan, e-learning, aplikasi diklat untuk memonitor seluruh kegiatan. Begitu juga data-data kurikulum ajar yang ada di Badiklat.

“Badiklat juga berharap BPK Corpu ke depan akan jadi rumah besar aplikasi, dan memiliki ruang-ruang informasi bagi seluruh pegawai,” ucap dia. ●

## MEMPERLUAS KIPRAH DENGAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA

Kebutuhan memiliki pegawai yang mampu berbahasa asing selain bahasa Inggris semakin penting mengingat BPK kian aktif di banyak organisasi internasional.



■ Selvia Vivi Devianti

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertekad untuk terus memperluas kiprah di dunia internasional. Tekad itu salah satunya dibuktikan dengan meningkatkan kemampuan para pemeriksa dalam berbahasa asing selain bahasa Inggris.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti mengatakan, pentingnya memiliki pegawai yang mampu berbahasa asing non-Inggris sudah disadari BPK sejak 2005. Atas alasan itulah, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPK kemudian merekrut pegawai-pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa asing.

“Perekrutan tak hanya dilakukan bagi mereka yang mampu berbahasa Inggris, tapi juga bahasa lainnya, seperti bahasa Arab dan bahasa Prancis,” kata Vivi saat berbincang dengan *Warta Pemeriksa*, pertengahan Mei.

Menurut Vivi, kemampuan bahasa Inggris para pemeriksa BPK sudah bagus. Apalagi, ada begitu banyak pegawai BPK yang telah mengikuti *secondment* di supreme audit ins-

titution (SAI) atau lembaga pemeriksa negara lain hingga menjadi pemeriksa eksternal organisasi internasional.

Vivi menambahkan, kebutuhan memiliki pegawai yang mampu berbahasa asing selain bahasa Inggris semakin penting mengingat BPK kian aktif di banyak organisasi internasional. Kiprah BPK di dunia internasional saat ini tak hanya di kalangan lembaga pemeriksa, melainkan juga di organisasi internasional yang berada di bawah United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Ternyata dengan kita mulai banyak terlibat aktif di organisasi internasional di UN, kemampuan bahasa selain bahasa Inggris menjadi suatu kekuatan penting. Sebab, untuk organisasi yang ada di UN, mereka selain mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris, juga meminta bahasa Prancis. Dengan demikian, ini jadi kompetensi yang juga harus dimiliki pegawai BPK,” ujar Vivi.

Vivi menjelaskan, BPK sejak 2020 sudah membuka kelas pelatihan bahasa Prancis. Menurut dia, kelas pelatihan tersebut disambut antusias oleh para pegawai BPK.

Saat ini, kata dia, pelatihan yang diberikan dalam kelas bahasa Prancis masih mendasar. Lebih banyak untuk mempelajari percakapan sehari-hari. Namun, ke depan, Biro KSI menargetkan peserta pelatihan untuk mengikuti tes tertulis bahasa Prancis yang diselenggarakan Pusat Kebudayaan Prancis. Dengan tes tersebut, maka para peserta bisa mendapatkan sertifikat dan memiliki nilai kemampuan bahasa Prancis seperti halnya tes TOEFL untuk bahasa Inggris.

“Selama ini kelas masih *conversation*. Selanjutnya, kita juga ingin para peserta mempelajari dokumen-dokumen laporan pemeriksaan berbahasa Prancis. Ini karena di UN laporannya menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Jadi, kalau kita tidak mempelajari bahasa selain Inggris, kita akan

terkendala bahasa. Padahal, di BPK banyak pemeriksa yang pintar. Bahasa jangan sampai jadi penghalang,” Vivi menegaskan.

Tekad BPK untuk memiliki pegawai yang mampu berbahasa asing selain bahasa Inggris juga akan diwujudkan dengan membentuk semacam unit fungsional penerjemah. Vivi menguraikan, Biro SDM belum lama ini menyampaikan bahwa saat ini ada jabatan fungsional penerjemah untuk aparatur sipil negara (ASN). Rencananya, BPK pada tahun ini akan merekrut lagi 50 CPNS yang memiliki latar belakang bahasa.

Vivi menekankan, meskipun CPNS yang direkrut memiliki latar belakang pendidikan bahasa, mereka tetap direkrut sebagai pemeriksa. Sebab, *core business* BPK adalah memeriksa. Oleh karena itu, CPNS tersebut tetap ditempatkan di satuan kerja pemeriksaan.

Namun, berkaca dari pengalaman, para pegawai berlatar belakang bahasa Asing, kemampuan bahasanya tak terasah setelah terjun sebagai pemeriksa. “Bahasa yang mereka gunakan paling bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kami di Biro KSI yang akan terus mendorong kemampuan bahasa mereka,” ujar Vivi.

Dengan memiliki pegawai yang mampu berbahasa asing selain Inggris, BPK akan dapat mengurangi biaya penerjemahan. Selama ini, kata Vivi, BPK jika memeriksa laporan mengenai proyek-proyek bantuan luar negeri, seperti pinjaman dan hibah, harus terlebih dahulu menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Adapun biaya penerjemahan tak murah, yakni mencapai Rp150 ribu per lembar.

“Artinya dengan kita punya fungsional penerjemah dan akan ada satu unit tersendiri, auditor-auditor berlatarbelakang bahasa bisa diberdayakan,” ucap dia.

Manfaat lainnya, laporan-laporan yang diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, bisa diunggah di dalam laman resmi BPK. Saat ini, BPK website BPK baru memiliki dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

“Kalau kita bisa memiliki laporan hasil pemeriksaan dengan bahasa asing selain bahasa

Inggris, BPK akan lebih mendunia. Dan kita dapat meningkatkan komunikasi kita dengan dunia internasional melalui laporan berbahasa selain bahasa Inggris. Kita pun menargetkan agar website BPK dengan bahasa Jerman, Prancis, Spanyol, dan Cina, misalnya,” kata dia.

## SAI G-20

Selain karena terlibat aktif di berbagai organisasi internasional, tekad BPK untuk mempelajari multibahasa juga sebagai persiapan menyambut Presidensi G-20 yang akan dipegang Indonesia pada 2022. Pada 2022, BPK berencana menggalas terbentuknya SAI G-20 atau wadah lembaga pemeriksa dari anggota negara-negara G-20.

Oleh karena itu, kata Vivi, para pimpinan BPK dan para pejabat eselon I juga akan ditingkatkan kemampuan bahasa asingnya, khususnya bahasa Inggris. BPK sudah memiliki konsultan bahasa terkait hal ini. Para pejabat

eselon I bahkan akan di-buatkan kelas pelatihan secara *one on one*.

“Kenapa ini penting? Karena jika BPK berhasil membentuk SAI G-20 sebagai *legacy*-nya Indonesia, maka pimpinan BPK dan eselon I akan banyak terlibat sebagai ketua dalam rapat-rapat yang isinya adalah pembentukan konsensus. Ini membutuhkan bahasa Inggris yang tidak umum, bahkan lebih pada diplomasi. Kita juga akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan kemampuan diplomasi.”

Vivi mengatakan, tujuan lain dari peningkatan kompetensi bahasa asing karena BPK bertekad menjadi *peer reviewer* atau lembaga yang mereviu ‘BPK’ negara lain. Ia mengatakan, salah satu kunci utama untuk menjadi *peer reviewer* adalah memahami bahasa dari ‘BPK’ negara lain yang akan diperiksa.

“Ini yang akan menjadi salah satu kekuatan BPK ke depan. Kita sudah punya SDM yang memahami SAI PMF (The Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework), memahami bagaimana melakukan *peer review*. Jadi, kita tinggal meningkatkan kemampuan berbahasa. Kita ingin lebih kuat lagi di dunia global,” kata Vivi. ●



**Kalau kita bisa memiliki laporan hasil pemeriksaan dengan bahasa asing selain bahasa Inggris, BPK akan lebih mendunia.**

## PEGAWAI BPK AKTIF MELATIH BAHASA PRANCIS

Kemampuan berbahasa selain bahasa Inggris akan memberikan kesempatan lebih luas bagi karyawan BPK.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu mendukung peningkatan kompetensi karyawan, termasuk dalam kemampuan berbahasa. Hal ini dirasakan langsung oleh staf Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Naomi Simamora.

Naomi mengatakan, BPK saat ini sedang membuka kelas bahasa Prancis dan ia bertugas sebagai koordinator yang mendampingi tenaga ahli bahasa atau pengajarnya. Pelatihan bahasa Prancis, menurut Naomi, telah digelar sejak Desember dan masih berlangsung hingga saat ini.

“Saat ini sedang dievaluasi untuk terus dikembangkan, karena sedari awal pesertanya sangat antusias ikut pelatihan ini,” kata Naomi.

Naomi menjelaskan, pelatihan ini bertujuan agar para pegawai BPK, termasuk pemeriksa, untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Tujuannya agar insan BPK lebih mudah untuk berkomunikasi ataupun memproses dokumen berbahasa asing selain Inggris.

“Kenapa dibutuhkan peningkatan kompetensi bahasa, karena BPK bergabung dengan organisasi-organisasi internasional. Jadi kita butuh bahasa lain, bukan saja bahasa Inggris,” katanya.

Bagi Naomi, memiliki keterampilan berbahasa asing selain bahasa Inggris akan memperluas jaringan internasional, baik dalam hubungan kerja maupun pertemanan. “BPK aktif di dunia internasional, sehingga itu menjadi poin tambahan yang bagus. Ketika ada tamu dari negara asing, kita bisa menemani. Dan orang asing merasa dihargai dan bisa memperoleh informasi yang lebih dalam lebih luas lagi,” ucap dia.

Selain itu, kemampuan berbahasa selain bahasa Inggris akan memberikan kesempatan lebih luas bagi karyawan BPK.

Naomi menceritakan, ia sendiri sejak awal



■ Naomi Simamora



**Kenapa dibutuhkan peningkatan kompetensi bahasa, karena BPK bergabung dengan organisasi-organisasi internasional.**

masuk ke BPK karena ada kebutuhan terhadap pegawai yang mampu berbahasa selain bahasa Inggris. Hanya saja, karena tidak terlalu banyak dilatih, kemampuan berbahasa Prancis yang dimilikinya memudar.

Oleh karena itu, ia tetap berupaya menjaga kemampuan berbahasa Prancis dengan menonton film atau mendengarkan musik berbahasa Prancis. Naomi menegaskan, kemampuan berbahasa sangat menuntut ketekunan dan harus sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Naomi sangat bersyukur karena dengan adanya program yang digelar BPK, ia kembali aktif menggunakan bahasa Prancis. “Saya menjadi *host* juga selain koordinator,” tutur dia.

Kendati demikian, ia mengakui dalam pekerjaan sehari-hari lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Hanya sekali-kali menggunakan bahasa Prancis, khususnya bila bertemu atau menjadi *liaison officer* tamu dari negara Prancis. ●



■ Adi Kurniadi

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang mendorong pegawai untuk memiliki kemampuan bahasa selain bahasa Inggris. Pegawai BPK Sumatera Selatan (Sumsel), Adi Kurniadi, merupakan salah satu insan BPK yang mampu berbahasa Arab. Bagi dia, mempelajari bahasa selain bahasa Inggris merupakan salah satu wujud penerapan nilai-nilai dasar BPK, khususnya profesionalisme.

Adi merasakan betul bahwa terdapat kelebihan tersendiri dengan memiliki kemampuan bahasa selain bahasa Inggris. Hal itu ia alami langsung ketika pada 2006 mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di Belanda. Saat itu, kata dia, ada begitu banyak mahasiswa dari Timur Tengah.

“Kita sering *ngobrol* sehari-hari dengan bahasa Arab, tentang aktivitas sehari-hari, jadi seperti itu saja. Tahun 2010 berangkat haji, di Makkah dan Madinah berinteraksi di tengah masyarakat sehari-hari lebih banyak menggunakan bahasa Arab,” ujar dia.

Meski demikian, Adi tak menampik bahwa kepiawaiannya dalam berbahasa Arab baru sebatas untuk percakapan sehari-hari dengan tingkat kesulitan bahasa yang tidak begitu tinggi. Namun, jika sudah membicarakan bidang tertentu, seperti teknologi, ia mengaku masih meraba-raba.

Oleh karena itu, Adi mengaku sangat bersyukur karena BPK memiliki komitmen mendorong pegawai untuk memiliki kemampuan bahasa selain bahasa Inggris. “Dan menurut saya, memiliki kemampuan berbahasa selain bahasa Inggris juga merupakan wujud implementasi nilai-nilai

## MENINGKATKAN PROFESIONALISME DENGAN KEMAMPUAN BAHASA ARAB

Program peningkatan kemampuan berbahasa sangat ditunggu pegawai BPK.

dasar BPK, khususnya profesionalisme,” ucap Adi.

Terkait motivasi untuk mempelajari bahasa Arab, Adi menyebut bukan sekadar untuk aktualisasi diri. Tapi juga ia ingin mempelajari Al-Quran lebih dalam. “Dan Al-Quran itu juga sarat dengan metode komunikasi. Ada contoh-contoh yang bisa saya terapkan di dunia kerja,” katanya.

Ia lalu membagikan tips dan motivasinya dalam mempelajari bahasa Arab. Adi menceritakan, ia mulai belajar bahasa Arab ketika masih kuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN. Ia belajar dengan teman-teman sekampus yang kebetulan juga aktif di masjid.

Ketika itu, senior mereka menawarkan untuk belajar bahasa Arab dengan seorang guru yang berasal dari pesantren Nahdlatul Ulama di sekitar kampus. Ia menyebut awalnya beberapa teman-teman sangat antusias, namun satu per satu mulai mundur dari kursus singkat selama lima bulan tersebut.

Adi mengaku saat itu cukup kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab, apalagi pelatihan hanya dilakukan selama sekali dalam sepekan. “Dengan buku *Matan Jurumiyah*, waktu itu saya belajar tata bahasa saja, sementara menulis tidak. Saya belajar menulis justru dengan menyalin mushaf,” katanya.

Karena merasa kurang maksimal dalam belajar berbahasa Arab, ia pun mendorong dirinya untuk bisa lebih dalam dan lebih giat. “Justru saya banyak mempelajari dari saya menghafal Al-Quran, menghadiri pengajian-pengajian (kajian yang menggunakan bahasa Arab),” katanya menambakan. ●



**Dengan buku *Matan Jurumiyah*, waktu itu saya belajar tata bahasa saja, sementara menulis tidak.**

## MODUL KONSOLIDASI TINGKATKAN KUALITAS LHP LKPP

Dengan adanya modul konsolidasi, progres dan hasil tahapan pemeriksaan LKKL dan LKBUN dapat dimonitor setiap saat.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengembangkan modul konsolidasi untuk penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Keberadaan modul konsolidasi ini tak hanya mengefisienkan proses penyusunan, tapi juga dapat meningkatkan kualitas LHP LKPP.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi mengatakan, modul konsolidasi merupakan *tools* yang dikembangkan untuk membantu proses konsolidasi *output* dari seluruh tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). "Proses input dan output pemeriksaan dilakukan seluruh tim pemeriksa LKKL dan LKBUN dan melalui proses validasi berjenjang sampai dengan level penanggung jawab pemeriksaan," kata Laode kepada *Warta Pemeriksa*, Jumat (21/5).

Laode menjelaskan, pada tahap perencanaan pemeriksaan, tim pemeriksa LKKL dan LKBUN akan menginput hasil penilaian risiko dan materialitas tahap perencanaan. Di tahap pelaksanaan pemeriksaan, tim pemeriksa LKKL dan LKBUN akan menginput laporan perkembangan pemeriksaan secara mingguan, materialitas tahap pelaksanaan, memperbarui hasil penilaian risiko, temuan pemeriksaan, dan hasil pelaksanaan tripartit.

Pada tahap ini, tim pemeriksa juga melakukan validasi atas LKKL/LKBUN *unaudited* untuk melihat apakah LKKL/LKBUN *unaudited* yang disampaikan oleh entitas kepada BPK untuk diperiksa telah sesuai dengan *database* yang membentuk LKKL/LKBUN tersebut.

Sedangkan pada tahap pelaporan, tim pemeriksa LKKL dan LKBUN akan memasukkan temuan pemeriksaan pada tahap Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP) dan LHP serta opini

masing-masing LKKL/LKBUN. Pada tahap ini, tim pemeriksa LKKL dan LKBUN juga akan melakukan validasi atas LKKL/LKBUN *audited* untuk melihat apakah LKKL/LKBUN *audited* yang disampaikan oleh entitas kepada BPK telah sesuai dengan *database* yang membentuk LKKL/LKBUN *audited* tersebut.

Laode mengatakan, keberadaan modul konsolidasi ini sangat membantu proses konsolidasi dalam pemeriksaan LKPP. Sebelum ada modul konsolidasi, kata dia, temuan pemeriksaan dari tim pemeriksa LKKL dan LKBUN digabungkan secara manual oleh tim pemeriksa LKPP.

"Tetapi dengan adanya modul konsolidasi, tim pemeriksa LKPP sekarang dapat menarik data temuan pemeriksaan yang telah dimasukkan tim pemeriksa LKKL/LKBUN ke dalam modul konsolidasi untuk selanjutnya dianalisa untuk menjadi temuan pemeriksaan tingkat LKPP," ujar dia.

Menurut Laode, ada beberapa hal yang mendorong BPK untuk mengembangkan modul konsolidasi ini. Pertama, untuk mengefisienkan proses konsolidasi *output* seluruh tahapan dalam pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN. Jika dulu proses konsolidasi dilakukan secara manual menggunakan Excel, maka saat ini proses konsolidasi dilakukan secara otomatis melalui modul konsolidasi. "Proses ini juga dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam proses konsolidasi," ujar dia.

Tujuan kedua, kata dia, untuk meningkatkan transparansi pelaksanaan pemeriksaan. Dengan adanya modul konsolidasi, tahapan pemeriksaan LKKL dan LKBUN dapat dimonitor setiap saat progres dan hasilnya. "Ini secara tidak langsung akan mendorong peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat LKKL dan LKBUN," katanya.

Laode menambahkan, hasil konsolidasi temuan yang disampaikan pada modul konsolidasi merupakan temuan yang telah divalidasi tim pemeriksa LKKL, sehingga dapat lebih



■ Laode Nusriadi

dipertanggungjawabkan. Selain itu, proses naik atau turunnya temuan dari laporan temuan pemeriksaan (LTP), KHP, hingga LHP terekam jelas dalam modul konsolidasi, baik temuan tersebut dihapus ataupun diubah oleh tim pemeriksa LKKL. Dengan adanya modul konsolidasi tersebut, ujar dia, LHP LKPP akan terbantu dan terjaga kualitasnya.

Mengenai fokus dalam modul konsolidasi, Laode menjelaskan bahwa semua yang proses dan penginputan yang dilakukan tim pemeriksa LKKL dan LKBUN ke dalam modul konsolidasi adalah menjadi fokus. Tetapi, biasanya fokus utama dalam modul konsolidasi terkait dengan penentuan temuan pemeriksaan dan opini.

Temuan pemeriksaan menjadi fokus utama karena pada dasarnya temuan pemeriksaan tingkat LKPP berasal dari konsolidasi temuan tingkat LKKL dan LKBUN. Kelengkapan dan ketepatan waktu input temuan pemeriksaan oleh tim pemeriksa LKKL dan LKBUN akan sangat mempengaruhi kualitas temuan pemeriksaan yang terkonsolidasi di tingkat LKPP.

Jika ada temuan pemeriksaan signifikan

tingkat LKKL dan LKBUN yang tidak diinput ke dalam modul konsolidasi, khususnya temuan pemeriksaan yang terkait dengan asersi laporan keuangan, tentunya akan berdampak pada kelengkapan temuan pemeriksaan di tingkat LKPP. Hal ini akan mempengaruhi analisa kewajaran penyajian tingkat LKPP. Sedangkan opini tingkat LKKL dan LKBUN menjadi fokus utama karena permasalahan-permasalahan yang menjadi alasan untuk mengkualifikasi suatu akun di tingkat LKKL dan LKBUN perlu dianalisis dampaknya terhadap LKPP. "Hal ini juga untuk melihat konsistensi dalam mempertimbangkan dampak suatu akun pada tingkat LKPP dan tingkat LKKL/LKBUN."

Ia menekankan, modul konsolidasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan LKPP penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan BPK. Selanjutnya, modul konsolidasi juga penting untuk menggabungkan temuan sejenis dan menjadi *benchmark* bagi pemeriksaan berikutnya, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

"Modul konsolidasi memang dikembangkan untuk kebutuhan internal BPK, sehingga tidak dapat diakses oleh pihak di luar BPK. Namun demikian, dengan adanya modul konsolidasi ini diharapkan dapat lebih meyakinkan seluruh *stakeholder* bahwa pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN telah melalui suatu proses yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan *stakeholder* terhadap kualitas hasil pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN semakin meningkat," kata Laode. ●



**Modul konsolidasi memang dikembangkan untuk kebutuhan internal BPK, sehingga tidak dapat diakses oleh pihak di luar BPK. Namun demikian, dengan adanya modul konsolidasi ini diharapkan dapat lebih meyakinkan seluruh *stakeholder* bahwa pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN telah melalui suatu proses yang transparan dan akuntabel.**



Majalah Warta Pemeriksa Edisi Maret 2020  
mendapatkan penghargaan

**SILVER WINNER**  
**PR Indonesia Awards 2021**

untuk Kategori Lembaga  
Sub Kategori Media Cetak

## VENDOR BERMASALAH, PRODUKSI MIGAS TERHAMBAT

Proses pelelangan yang dilakukan KKKS belum optimal dalam menghasilkan pemenang lelang yang bonafide, kompeten, serta memiliki kemampuan keuangan yang baik.



wirestock-freepik

**B**adan Pemeriksa Keuangan pada semester II 2020 telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas proyek-proyek dan rantai suplai migas tahun 2018 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan instansi terkait. Hasil pemeriksaan BPK yang juga telah dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020 menyimpulkan, proyek-proyek dan rantai suplai migas tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.

Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Daniel Lumban Tobing mengatakan, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah penyelesaian proyek yang terlambat hingga enam tahun. "Keterlambatan itu terjadi karena ketidakmampuan keuangan perusahaan pelaksana (vendor), sehingga produksi minyak dan gas bumi pada wilayah kerja tersebut menjadi tertunda," kata Daniel dalam pernyataan tertulisnya kepada *Warta Pemeriksa*, April.

Catatan lain yang juga diterbitkan yaitu mengenai satu *vertical christmas tree* (peralatan pengeboran migas lepas pantai/*off shore rig*) tidak dapat masuk ke wilayah pabean Indonesia, sehingga produksi migas pada wilayah kerja ter-

sebut menjadi tertunda. Tidak dapat masuknya peralatan ini disebabkan oleh hasil evaluasi otoritas terkait yang menunjukkan adanya indikasi perbedaan harga dengan alat yang sama pada pengadaan lainnya.

Permasalahan lainnya, kata Daniel, beberapa KKKS memiliki material *Maintenance, Repair, and Operation* (MRO) yang berlebihan dengan nilai signifikan hingga mencapai puluhan juta dolar AS. "Hal ini melebihi 8 persen sebagai batas yang diperkenankan atas persentase jumlah surplus material dan *dead stock* dibandingkan dengan total material persediaan akhir tahun," ujar Daniel.

Ia menjelaskan, surplus material tersebut merupakan kategori material persediaan yang selama dua sampai dengan lima tahun tidak ada pemakaian atau pengeluaran. Sedangkan *dead stock* (tidak bergerak) merupakan kategori material persediaan yang selama lebih dari lima tahun tidak ada pemakaian atau pengeluaran.

"Tentu hal ini dapat menambah biaya pengelolaan persediaan material dan pada akhirnya dapat berdampak pada inefisiensi keuangan negara," katanya.

Daniel mengungkapkan, sejumlah permasalahan tersebut disebabkan oleh kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan pihak-pihak terkait, khususnya KKKS dan SKK Migas. Ia menekankan, perusahaan pelaksana (vendor)

yang terlambat dalam penyelesaian proyek merupakan perusahaan pemenang dalam pelelangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelelangan yang dilakukan KKKS belum optimal dalam menghasilkan pemenang lelang yang bonafide dan kompeten serta memiliki kemampuan keuangan yang baik.

Demikian juga dengan catatan tentang tidak dapat masuknya peralatan *vertical christmas tree* sehingga menunda produksi migas. Menurut dia, hal ini bisa terjadi karena KKKS yang bersangkutan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dan mematuhi tata cara pengurusan untuk memperoleh persetujuan otoritas terkait. Persetujuan tersebut diperlukan agar peralatan yang diimpor tersebut dapat masuk ke wilayah pabean Indonesia.

Sedangkan untuk catatan terkait surplus material dan *dead stock* yang melebihi persentase yang diperkenankan disebabkan KKKS kurang cermat dalam merencanakan kebutuhan barang dan SKK Migas tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kebutuhan barang yang diajukan KKKS.

Atas catatan keterlambatan pelaksanaan proyek, ujar Daniel, BPK telah merekomendasikan pengenaan saksi denda keterlambatan kepada perusahaan pelaksana proyek. Selain itu, BPK merekomendasikan agar KKKS mencari solusi terbaik untuk menanggulangi keterlambatan penyelesaian proyek tersebut.

Sedangkan untuk catatan peralatan impor yang tidak dapat masuk ke wilayah pabean Indonesia, BPK merekomendasikan agar SKK Migas tidak menyetujui biaya penyimpanan dan pemeliharaannya. Hal ini untuk memitigasi risiko penambahan biaya yang dapat merugikan keuangan negara. Adapun mengenai catatan terkait surplus material dan *dead stock* yang melebihi batas yang diperkenankan, BPK merekomendasikan agar para pimpinan KKKS terkait memperhitungkan kelebihan pembebanan *cost recovery* atas surplus material MRO yang berlebihan pada akhir periode berdasarkan nilai perolehan yang telah dibebankan sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek dan rantai suplai pada SKK Migas dan KKKS mengungkapkan 12 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 5 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 9 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4,24 triliun. ●

## HASIL PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PROYEK DAN RANTAI SUPLAI MIGAS

### PERMASALAHAN SIGNIFIKAN

Pemerintah belum menerima tambahan bagian negara atas kelebihan pembebanan *cost recovery* dengan total nilai Rp4,24 triliun.

### SEJUMLAH PENYEBAB PERMASALAHAN DAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN

**1 Permasalahan**  
Usulan realisasi biaya *Authorization For Expenditure (AFE)* oleh KKKS melebihi persetujuan *closed out AFE* yang diterbitkan SKK Migas Tahun 2018 dan 2019.

#### Akibat

Berkurangnya PNBP Migas dari kelebihan pembebanan *cost recovery* tahun 2018 dan 2019 sebesar 182,85 juta dolar AS.

**2 Permasalahan**  
Terdapat 24 KKKS dengan surplus material *maintenance, repair, and operation (MRO)* yang berlebihan, yaitu nilai *dead stock* dan surplus material melebihi 8 persen dari total material persediaan pada akhir tahun berjalan.

#### Akibat

Pembebanan penggantian *cost recovery* atas surplus material MRO yang berlebihan sebesar 75,03 juta dolar AS.

**3 Permasalahan**  
Penyelesaian pekerjaan *Lease Purchase of Floating Production Unit (FPU)* untuk Pengembangan Lapangan MDA-MBH pada KKKS Husky-CNOOC Madura Ltd (HCML) berlarut-larut.

#### Akibat

Terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan minimal sebesar 19,52 juta dolar AS.

### REKOMENDASI BPK

**1** Kepala SKK Migas memerintahkan pimpinan KKKS-KKKS terkait supaya mematuhi dan melakukan koreksi biaya operasi sesuai Surat Persetujuan *Closed Out AFE* yang dikeluarkan SKK Migas sebesar 182,85 juta dolar AS.

**2** Pimpinan KKKS-KKKS terkait supaya memperhitungkan kelebihan pembebanan *cost recovery* atas surplus material MRO yang berlebihan sebesar 75,03 juta dolar AS pada akhir periode *product sharing contract (PSC)* berdasarkan nilai perolehan yang telah dibebankan sebelumnya.

**3** Manajemen HCML dan Pimpinan SKK Migas segera membenarkan keputusan terbaik atas pekerjaan *Lease Purchase FPU* serta HCML mengenakan denda keterlambatan minimal sebesar 19,52 juta dolar AS.

Sumber: IHPS II 2020

## PENERAPAN E-GOVERNMENT KURANG EFEKTIF

Perencanaan dan pembangunan perangkat lunak Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum sesuai dengan standar pengelolaan manajemen proyek pengembangan sistem informasi yang baik.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government* tahun 2019-semester I 2020 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan, upaya yang dilakukan oleh Kemendagri masih kurang efektif dalam penerapan SPBE tahun 2019-semester I 2020.

Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya sejumlah permasalahan yang diungkapkan BPK melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020. Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penerapan SPBE mengungkapkan 15 temuan yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menilai, penguatan regulasi/kebijakan/standar/prosedur yang mendukung percepatan penerapan SPBE pada Kemendagri belum optimal. Hal ini ditunjukkan antara lain pada kebijakan penerapan SPBE Kemendagri yang belum seluruhnya ditetapkan.

"Penerapan Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) belum sepenuhnya didukung dengan regulasi dan regulasi yang mengatur tentang pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan daerah lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya," ungkap BPK dalam IHPS II 2020.

Akibatnya, penerapan SPBE di lingkungan Kemendagri masih bersifat parsial dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penerapan layanan administrasi dan konsultasi pada SIOLA belum optimal dan menimbulkan multitafsir dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Kemendagri juga belum menetapkan rancangan arsitektur, peta rencana, dan proses bisnis SPBE yang menjadi acuan dalam pengembangan

dan percepatan penerapan SPBE. Akibatnya, penyelenggaraan SPBE pada Kemendagri belum terintegrasi dan berisiko terjadinya duplikasi pembangunan aplikasi dan layanan SPBE. BPK juga menemukan, rancangan arsitektur SPBE Kemendagri atau *grand design* teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Kemendagri dan rancangan peta rencana (road map) SPBE Kemendagri belum selaras dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.



**Portal layanan SIPD belum menyediakan fitur yang lengkap sesuai ketentuan dan kebutuhan pemda, belum memiliki *application control* yang memadai, serta tidak memiliki kemampuan integrasi atau interoperabilitas dengan sistem yang dimiliki pemda.**

BPK juga menyoroti, perencanaan dan pembangunan perangkat lunak Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum sesuai dengan standar pengelolaan manajemen proyek pengembangan sistem informasi yang baik. Hal itu karena tidak didasarkan hasil evaluasi dan analisa kebutuhan serta tidak mengikuti tahapan yang sesuai standar.

"Selain itu, portal layanan SIPD belum menyediakan fitur yang lengkap sesuai ketentuan dan kebutuhan pemda, belum memiliki *application control* yang memadai, serta tidak memiliki kemampuan integrasi atau interoperabilitas dengan sistem yang dimiliki pemda," ungkap BPK.

Hal tersebut kemudian berakibat pada tidak terukurnya ketepatan waktu penyelesaian dan tingkat keberhasilan pembangunan, pengembangan, dan implementasi SIPD baik per subsistem maupun perangkat lunak secara keseluruhan.

Perangkat lunak SIPD juga belum sepenuhnya sesuai kebutuhan proses bisnis, belum tervalidasi keandalannya, tidak dapat segera dioperasikan dengan efektif, dan berpotensi tidak sesuai dengan konsep keterpaduan SPBE secara nasional. Selain itu, terdapat risiko terjadinya kegagalan perangkat lunak SIPD dalam mengintegrasikan data dan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Terkait permasalahan tersebut, BPK pun merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menginstruksikan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional dalam menyusun dan menetapkan

regulasi penerapan SPBE pada Kemendagri dan pemda.

BPK juga meminta Mendagri untuk melakukan penyusunan dan penetapan rancangan *grand design* TIK atau arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, dan proses bisnis SPBE Kemendagri serta pemda agar menjadi salah satu program dan kegiatan prioritas dalam renstra maupun anggaran tahunan Kemendagri.

BPK pun menginstruksikan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, dan Kepala Pusdatin untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pembangunan, pengembangan, implementasi, integrasi, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan dalam penerapan SIPD.

BPK juga mendorong Kemendagri agar menerapkan kaidah yang baik atau *best practices* yang berlaku umum dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pengembangan, *piloting* serta implementasi rekayasa perangkat lunak SIPD. ●



foto: sipd.kemendagri.go.id & freepik (diolah)



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III/Anggota III BPK Achsanul Qosasi

## MENJAWAB PERTANYAAN MASYARAKAT ATAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Pemeriksaan ini dapat membantu pemerintah agar bisa melakukan penyesuaian dan perbaikan sembari penanganan pandemi Covid-19 tetap berjalan.

**P**enanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) menjadi perhatian masyarakat luas saat ini. Program pemerintah itu dianggarkan hingga mencapai Rp695 triliun. Dalam pemeriksaannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat, alokasi anggaran program tersebut bahkan mencapai Rp933,33 triliun yang tersebar pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan hibah/sumbangan masyarakat dan dikelola pemerintah.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III/Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyampaikan, dengan jumlah anggaran yang relatif besar, masyarakat akan mempertanyakan penggunaan dana tersebut. Sebagai penjaga akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara, BPK pun turut memberikan andil dalam penanganan pandemi dengan mencoba menjawab pertanyaan masyarakat tersebut.

“Rakyat akan bertanya sehingga pemeriksaan kita fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari masyarakat,” ujar Achsanul kepada *Warta Pemeriksa*, Senin (12/4).

Pertanyaan terkait program tersebut antara lain, bagaimana proses penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Selain itu, masyarakat juga ingin mengetahui efektivitas program PC-PEN dan kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan.

Achsanul yang juga Koordinator Pemeriksaan PC-PEN BPK mengatakan, saat ini pemeriksaan sudah selesai. Sebanyak 242 laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah disusun menjadi satu laporan yang kemudian diserahkan kepada pemerintah dan lembaga perwakilan.

Achsanul mengatakan, seluruh elemen negara di Indonesia sejatinya bergerak untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dan meredam dampak ekonomi yang ditimbulkan. Salah satu langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.

“Anggaran dan kegiatan yang tidak menjadi prioritas dialihkan untuk kepentingan penanganan Covid-19,” ujar Achsanul.

Achsanul mengatakan, masyarakat juga perlu memahami suasana kepanikan dalam pengelolaan anggaran yang terjadi ketika pandemi Covid-19 mulai terasa di Indonesia pada tahun lalu. Pemerintah, ujarnya, mencoba menyusun strategi yang paling efektif untuk menekan penyebaran sembari menjaga roda perekonomian tetap berputar.

“Terkait daya beli masyarakat yang anjlok, pemerintah langsung menggelontorkan bantuan tunai. Makanya mayoritas dari anggaran PC-PEN itu mayoritas bantuan tunai. Karena pemerintah ingin mentransfer uang ke masyarakat supaya mereka berbelanja dan memutar kembali roda ekonomi,” ujarnya.

Dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerimaan Perintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, terdapat 11 undang-undang yang dapat dilanggar dalam tempo tiga tahun.

Contohnya, kata Achsanul, pengadaan barang sebelumnya harus melalui lelang menjadi hanya perlu *beauty contest*. Selain itu, batasan defisit APBN pun dibolehkan melebihi batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

BPK pun memahami hal ini dilakukan karena keadaan darurat. Kendati demikian, walaupun darurat, pemerintah harus tetap menjaga akuntabilitas.

“Walaupun prosesnya butuh kecepatan, akuntabilitas harus tetap terjaga,” ungkap Achsanul.

Dari pemeriksaan yang dilakukan, BPK ke-

mudian mengungkapkan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Achsanul mengatakan, temuan paling dominan berkaitan dengan akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat. Menurutnya, persoalan ini memang kerap terjadi karena permasalahan akurasi data.

“Kalau datanya tidak tepat maka sasarannya juga tidak tepat. Basis data ini sampai sekarang memang masih lemah,” ujar Achsanul.

Achsanul berharap, hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait program PC-PEN ke depan. Hal ini karena penanganan pandemi Covid-19 tak hanya dilakukan pada 2020 saja, tapi hingga 2023.

“Yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik diperbaiki,” ungkapnya.

Pemeriksaan PC-PEN merupakan kontribusi BPK untuk menjaga implementasi penanganan pandemi di Tanah Air. Oleh karena itu, BPK pun melakukan *ongoing audit* untuk pertama kalinya.

“Jangan sampai BPK menunggu saja di 2023, tapi nanti justru banyak sekali temuannya itu. Kalau berjalan beriringan, pemerintah bisa memperbaiki penanganan pandemi berdasarkan temuan-temuan dan rekomendasi BPK,” ujar Achsanul.

Menurut Achsanul, pemeriksaan ini dapat membantu pemerintah agar bisa dilakukan

penyesuaian dan perbaikan sembari penanganan pandemi Covid-19 tetap berjalan.

Achsanul menyampaikan, pemeriksaan di masa pandemi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemeriksa BPK. Sejak pandemi ditetapkan, BPK pun segera merespons dengan menerbitkan panduan pemeriksaan khusus. Salah satu poin pentingnya adalah pemeriksaan bisa dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

“Bukti-bukti bisa difoto dan dikirimkan melalui bantuan IT. Tentunya kami juga tidak mau pemeriksa menghadapi risiko tinggi terpapar Covid-19,” ujarnya.

Walaupun begitu, ujar Achsanul, keyakinan pemeriksa tetap diutamakan. Apabila pemeriksa belum yakin maka akan diuji dengan sejumlah cara.

“Misalnya, dicek dari catatan perpajakan untuk membuktikan suatu pengadaan barang. Jadi, ada banyak cara dan pemeriksa BPK sudah cukup cangguh untuk melakukan hal itu,” ujarnya. ●



## Anggaran dan kegiatan yang tidak menjadi prioritas dialihkan untuk kepentingan penanganan Covid-19.

## KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUMAH SUSUN TAK SINKRON

Masih terdapat peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan rumah susun yang tidak sinkron antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

**B**adan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan tahun 2018-semester I 2020. Pemeriksaan itu dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan permasalahan signifikan yang ditemukan BPK berdampak terhadap keberhasilan usaha program Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, terdapat beberapa per-

masalahan yang berpotensi dapat mengganggu keberhasilan usaha meningkatkan penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan. Hal itu antara lain kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum sepenuhnya mendukung penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan.

BPK menyebut, kebijakan terkait penyediaan rumah susun belum dilengkapi peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan masih terdapat peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan rumah susun yang tidak sinkron antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal itu kemudian mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Stra-



pu.go.id

**EFEKTIVITAS Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan**

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan tahun 2018-semester I 2020 pada Kementerian PUPR dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan menyimpulkan permasalahan signifikan yang ditemukan BPK berdampak terhadap keberhasilan usaha program Penyediaan Rumah Susun Layak Huni dan Berkelanjutan.

**1**

**Temuan Pemeriksaan:** Kebijakan dan regulasi dari setiap level pemerintahan belum sepenuhnya mendukung penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan.

**Akibat:** Tidak tercapainya target sasaran yang telah ditentukan dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra 2015-2019.

**Rekomendasi BPK kepada Menteri PUPR:** Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkeu dalam sinkronisasi sejumlah aturan.

**2**

**Temuan Pemeriksaan:** Proses verifikasi permohonan/usulan bantuan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) belum dilaksanakan secara cermat dan belum memastikan ketepatan sasaran sesuai tujuan program.

**Akibat:** Laporan akhir verifikasi tidak mencerminkan informasi yang utuh atas proses verifikasi.

**Rekomendasi BPK kepada Menteri PUPR:** Direktur Rumah Susun menyusun SOP yang mengatur langkah-langkah spesifik untuk memastikan proses verifikasi telah dilaksanakan secara memadai.

Ilustrasi: stories-freepik

tegis (Renstra) 2015-2019 untuk penyediaan rumah susun sewa bagi rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal sinkronisasi atas UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Selain itu, BPK juga menemukan proses verifikasi permohonan/usulan bantuan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) belum dilaksanakan secara cermat dan belum memastikan ketepatan sasaran sesuai tujuan program. Di antaranya, terdapat permohonan/usulan yang belum lengkap secara administrasi dan/atau belum layak secara teknis tetapi sudah

masuk dalam surat keputusan (SK) penetapan lokasi. Selain itu, belum ada mekanisme yang spesifik dan terukur untuk memastikan bahwa penerima manfaat dari bantuan pembangunan rusunawa tepat sasaran sesuai rencana peruntukan awal khususnya untuk MBR.

Permasalahan itu mengakibatkan laporan akhir verifikasi tidak mencerminkan informasi yang utuh atas proses verifikasi karena personel yang melakukan verifikasi belum memiliki acuan kerja yang jelas dan terperinci.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar memerintahkan Direktur Rumah Susun menyusun SOP yang mengatur langkah-langkah spesifik untuk memastikan proses verifikasi telah dilaksanakan secara memadai, melaksanakan pengawasan dan pengarahan dalam proses verifikasi, serta membuat rancangan ketentuan/mechanisme yang lebih terukur. Termasuk di dalamnya melibatkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P).

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyediaan rumah susun layak huni dan berkelanjutan mengungkapkan 13 temuan yang memuat 16 permasalahan ketidakefektifan. ●

## BPK TEMUKAN 23 PERMASALAHAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

Terdapat penyaluran dana PIP kepada siswa minimal sebanyak 5,36 juta siswa atau sebesar Rp2,86 triliun tidak tepat sasaran karena diberikan kepada siswa yang tidak layak/tidak diusulkan menerima.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) periode tahun anggaran 2018-semester I 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan PIP pada Kemendikbud telah sesuai kriteria dengan pengecualian. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan PIP mengungkapkan tujuh temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 20 kelemahan sistem pengendalian intern, dua permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp33 juta, dan satu permasalahan terkait aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) senilai Rp2,86 triliun.

PIP yang dikelola oleh Kemendikbud adalah salah satu program prioritas pembangunan pemerintah. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.

Program ini juga diperuntukan bagi peserta didik dan mahasiswa dengan pertimbangan khusus antara lain yang berasal dari keluarga peserta Program Keluarga

Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), berstatus yatim piatu/yatim/dari panti sosial/panti asuhan, berasal dari daerah yang terkena dampak bencana alam, atau dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dan beberapa pertimbangan khusus lainnya.

Tujuan PIP untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, PIP bertujuan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi dan menarik siswa putus sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan,



indonesiapintar.kemdikbud.go.id

satuan pendidikan nonformal lainnya, atau balai latihan kerja.

Sedangkan tujuan PIP bagi pendidikan tinggi adalah meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi, meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial, serta meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

BPK mengungkapkan, permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pengelolaan PIP pada Kemendikbud antara lain perencanaan PIP belum dilaksanakan secara memadai karena data pokok pendidikan (dapodik) yang digunakan sebagai sumber data pengusulan calon penerima tidak handal. Sementara itu, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan NIK belum digunakan sebagai acuan untuk pemberian bantuan.

Akibatnya, peserta didik pemilik KIP dan/ atau yang berasal dari keluarga peserta PKH/KKS sebanyak 2,45 juta siswa kehilangan kesempatan karena tidak diusulkan dalam SK penerimaan bantuan PIP. Selain itu, terdapat penyaluran dana PIP kepada siswa minimal sebanyak 5,36 juta siswa atau sebesar Rp2,86 triliun tidak tepat sasaran karena diberikan kepada siswa yang tidak layak/ tidak diusulkan menerima.

BPK merekomendasikan kepada Kemendikbud untuk melakukan verifikasi dan validasi isian dapodik dari satuan pendidikan dalam rangka pengelolaan PIP serta melakukan pembersihan dan perbaikan data sesuai ketentuan tata kelola data yang berlaku. Kemendikbud juga perlu memiliki prosedur standar bagi operator dapodik untuk mengusulkan penerima PIP, menggunakan NISN dan NIK sebagai acuan pemberian bantuan, serta mempertanggungjawabkan penyaluran PIP kepada siswa yang tidak layak dan belum dicairkan dengan menyetorkan kembali ke kas negara.

BPK juga menemukan pelaksanaan penyaluran dan pencairan PIP tidak memadai. Hal itu ditunjukkan dari SK penetapan penerima PIP tidak



**Terdapat dana PIP tahun 2019 dan 2020 yang mengendap selama lebih dari 105 hari di bank penyalur sebesar Rp1,98 triliun yang berpotensi memberikan penerimaan jasa giro sebesar Rp167,90 miliar tetapi tidak dapat ditagih.**

tepat waktu, pelayanan bank belum optimal dan menjangkau seluruh peserta didik, serta proses penyaluran PIP tidak sesuai ketentuan.

Hal itu mengakibatkan proses penyaluran dan pencairan dana PIP terhambat. Selain itu, terdapat dana PIP tahun 2019 dan 2020 yang mengendap selama lebih dari 105 hari di bank penyalur sebesar Rp1,98 triliun yang berpotensi memberikan penerimaan jasa giro sebesar Rp167,90 miliar tetapi tidak dapat ditagih.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Kemendikbud mengatur tentang *timeline* penerbitan SK dan penyaluran PIP secara jelas dan meningkatkan pengendalian penyaluran PIP oleh bank penyalur. Selain itu, penyaluran dana PIP tahun 2019 dan 2020 yang belum dicairkan melebihi 105 hari agar dipertanggungjawabkan dengan mengembalikan ke kas negara.

Temuan lain yang diungkap BPK adalah penyaluran bantuan biaya pendidikan mahasiswa miskin berprestasi (Bidikmisi) belum dilakukan secara optimal. Di antaranya, dana Bidikmisi berupa biaya hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp69,54 miliar belum disalurkan kepada penerima dan terdapat 28 penerima Bidikmisi yang tidak terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan nilai bantuan sebesar Rp184,80 juta.

Akibatnya, dana Bidikmisi tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima dan terjadi kelebihan pembayaran atas penyaluran Bidikmisi kepada mahasiswa yang tidak terdaftar dalam PDDikti.

BPK merekomendasikan kepada Kemendikbud agar mempertanggungjawabkan dana Bidikmisi yang belum disalurkan sebesar Rp69,54 miliar dan mengembalikan ke kas negara atas penerima dana Bidikmisi yang tidak terdapat dalam PDDikti dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya serta menyusun petunjuk teknis penyaluran Bidikmisi/ KIP Kuliah. ●

## MERAIH MAGISTER LEWAT *E-LEARNING*

Program S2 *E-learning* menerapkan metode pembelajaran kombinasi.

**S**umber daya manusia (SDM) merupakan modal utama dari sebuah organisasi. Hal ini disadari betul oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mendukung dan memfasilitasi para pegawai yang ingin meraih gelar pendidikan yang lebih tinggi.

Peningkatan kompetensi SDM tak hanya dilakukan oleh BPK pusat, tapi juga oleh BPK perwakilan. Di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), misalnya, terdapat program S2 *E-Learning* yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia.

Kepala Perwakilan BPK Sulbar Hery Ridwan menjelaskan, program S2 yang diselenggarakan adalah kelas kerja sama program studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia. Program S2 *E-Learning* ini dimulai sejak 2020.

Ia menjelaskan, program S2 *E-learning* menerapkan metode pembelajaran kombinasi, yaitu penyampaian materi dengan menggunakan komputer dan layanan daring sebagai media komunikasi, seperti penggunaan *e-mail (asynchronous)*, komunikasi melalui aplikasi virtual seperti *zoom, video call (synchronous)*, tatap muka kelas di luar hari kerja, dan metode lain disesuaikan dengan kondisi yang ada serta ketentuan lain yang berlaku.

Dengan adanya pandemi Covid-19, kebijakan pelaksanaan tatap muka kelas dilakukan secara daring. Sebelum menjalankan kerja sama ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Biro SDM dan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK.

"Penyelenggaraan program kelas kerja sama ini dilakukan dalam rangka mendukung pengem-



bangan diri dan peningkatan kemampuan serta profesionalisme pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang berbasis kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan," tutur Hery kepada *Warta Pemeriksa*, akhir Mei.

UI sendiri merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang dapat menyelenggarakan metode pendidikan jarak jauh. UI memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih luas dalam melaksanakan fungsi pendidikan, pembelajaran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah terakreditasi.

"Sejauh ini tidak terdapat kendala yang dihadapi saat menggagas program ini. Komunikasi aktif telah dilakukan BPK Perwakilan Sulawesi Barat dengan pihak UI dan BPK Pusat sehingga dapat terlaksananya program tersebut," tutur dia.

Hingga kini, implementasi program telah berjalan sesuai dengan rencana. Kelas kerja sama yang sedang berjalan telah memasuki masa pendidikan semester ke II. Terdapat delapan pegawai yang telah mengikuti program ini. BPK Sulbar berharap program ini dapat berlanjut untuk mengakomodasi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulbar yang berminat mengikuti program ini.

Menurut dia, adanya pandemi Covid-19 juga tidak mengganggu proses belajar. Mekanisme pembelajaran selama ini dilakukan melalui media aplikasi *online* dan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di luar jam kerja, yaitu dan Sabtu, sehingga tidak mengganggu tugas pemeriksaan dan juga tugas-tugas kantor lainnya.

"BPK Pusat mendukung penyelenggaraan program ini dengan memberikan Surat Ijin Belajar bagi para pegawai yang mengikuti program ini," ujar dia. ●



**Komunikasi aktif telah dilakukan BPK Perwakilan Sulawesi Barat dengan pihak UI dan BPK Pusat sehingga dapat terlaksananya program tersebut.**



## SAMPAIKAN HASIL PEMERIKSAAN IAEA, BPK PASTIKAN LAYANAN TERBAIK

Hingga saat ini, BPK telah memberikan 79 rekomendasi.



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam PBC Meeting yang berlangsung secara virtual.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk tahun anggaran 2020. Hal tersebut disampaikan dalam Programme and Budget Committee (PBC) Meeting Of IAEA yang digelar pada 4 Mei 2021. Ini merupakan kali kedua *PBC meeting* dilakukan secara virtual karena pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan bahwa tahun depan merupakan kesempatan terakhir BPK menjadi pemeriksa eksternal IAEA. Karenanya, BPK tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan akuntabilitas IAEA dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dia menambahkan, karena tahun depan merupakan kesempatan terakhir, BPK mempersiapkan *hand-over* pemeriksaan pada pemeriksa eksternal selanjutnya. Hal ini berdasarkan ISA 300 tentang Planning an Audit of Financial Statements. Untuk keperluan *hand-over* ini, tim pemeriksa BPK telah mempersiapkan dengan baik dokumen-dokumen pemeriksaan, antara lain kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. Termasuk di dalamnya monitoring tindak lanjut rekomendasi BPK.

Pemeriksaan atas IAEA juga disebutkan akan direviu oleh Inspektorat Utama (Itama) BPK. Hal ini untuk keperluan *hand-over* dan untuk memperoleh keyakinan mutu (*quality assurance*) bahwa pemeriksaan BPK telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ISA dan ISSAI. Persiapan reviu oleh Itama akan mulai



■ Tim Pemeriksa IAEA dari BPK



**BPK tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk meningkatkan akuntabilitas IAEA dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.**

dilaksanakan pada tahun ini. Dalam pertemuan ini, Ketua BPK juga menyampaikan keyakinan bahwa tujuan pemeriksaan dapat dicapai meskipun pemeriksaan dilakukan secara *remote*.

Pemeriksaan TA 2020 merupakan pelaksanaan tahun kelima. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pemeriksaan meliputi pemeriksaan keuangan dan kinerja atas IAEA.

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan IAEA bebas dari salah saji baik karena *error* maupun *fraud*. Serta telah disusun sesuai dengan the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Sedangkan, pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas manajemen di IAEA.

Pada pemeriksaan kinerja TA 2020, objek pemeriksaan adalah Sustainable Intensification of Livestock Production Systems, Sustainable Control of Major Insect Pests, Radioisotope Production and Radiation Technology, and Incident and Emergency Preparedness and Response so as to improve IAEA's service to Member States.

Pemeriksaan keuangan dan kinerja TA 2020

memang dilaksanakan secara *remote*. Akan tetapi, BPK tetap patuh pada International Standards on Auditing (ISA) dan the International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI).

Selama lima tahun berturut-turut, LK IAEA mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Akan tetapi, tentunya terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Pada pemeriksaan TA 2020, BPK memberikan 21 rekomendasi.

Beberapa rekomendasi dalam pemeriksaan keuangan antara lain, terkait dengan defisit kas, Project Inventories In-Transit to Counterparts, konsultan dan tenaga ahli, mekanisme pendanaan untuk After Service Health Insurance (AS-HI), dan penyelesaian draf kerangka pengendalian internal. Sedangkan rekomendasi untuk pemeriksaan kinerja TA 2020 yaitu terkait Emergency Preparedness and Response (EPR). Direkomendasikan bahwa IAEA harus memperluas cakupan dan kerja sama dalam mempromosikan EPR Information Management System (EPRIMS).

BPK juga memahami bahwa IAEA saat ini sudah berupaya untuk menghimpun *assessed contributions* dari negara-negara anggota. Apalagi pandemi Covid-19 juga telah mempengaruhi kontribusi yang berhasil terkumpul. Dalam pemeriksaan kinerja, BPK juga menghargai bahwa IAEA telah secara efektif mengelola program-programnya.

Hingga saat ini, BPK telah memberikan 79 rekomendasi. Dalam pemeriksaan selama ini, tim pemeriksa BPK selalu memantau tindak lanjut rekomendasi. Tercatat dalam pemantauan atas rekomendasi periode 2016–2019, 56 rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Jumlah itu sekitar 70,89% dari total rekomendasi. BPK memberikan apresiasi atas pencapaian ini dan mengharapkan rekomendasi-rekomendasi itu menjadi stimulus untuk meningkatkan pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi IAEA.

Selain Ketua, delegasi BPK yang menghadiri pertemuan ini adalah Wakil Ketua Agus Joko Pramono, Penanggung Jawab Pemeriksaan Bahtiar Arif, Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan R Yudi Ramdan Budiman, Kepala Biro Humas dan KSI Selvia Vivi Devianti, selaku Pengendali teknis Pemeriksaan Kinerja I Gede Sudi Adnyana, Pengendali Teknis Pemeriksaan Keuangan Cipto Nugroho, dan Kepala Bagian KSI Kusuma Ayu Rusnasanti. ●

## WAKIL KETUA BPK IKUTI SERANGKAIAN DISKUSI DI PERTEMUAN UN IAAC KE-54

Melalui peran wakil ketua IAAC PBB, Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama pengawasan di lembaga-lembaga di bawah PBB.



**W**akil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono, selaku Vice Chair The Independent Audit Advisory Committee United Nations (IAAC), menghadiri pertemuan ke-54 United Nations IAAC. Pertemuan diadakan secara virtual melalui aplikasi Microsoft Teams pada 21-23 April 2021.

Hadir juga dalam pertemuan itu empat *member* IAAC lainnya, yaitu Ms Janet St Laurent (Amerika Serikat) sebagai chair, Ms Dorothy A Bradley (Belize), Mr Anton V Kosyanenko (Rusia), dan Mr Imran Vanker (Afrika Selatan), serta Executive Secretary IAAC, Moses Bamuwamye.

Agenda pada pertemuan ke-54 ini adalah diskusi dengan Controller, Mr Ramanathan; Under-Secretary General (USG) OIOS, Ms Fatoumata Ndiaye; Director of Under-Secretary General (USG) DMSPC, Ms Catherine Pollard; dan USG DESA, Mr Liu Zhenmin.

Pertemuan dengan Ramanathan membahas mengenai rencana anggaran program tahun 2022 serta implikasi operasional dalam laporan keuangan organisasi terkait Peace Keeping Operation. Kemudian juga atas After Service Health Insurance (ASHI).

Pertemuan dilanjutkan diskusi dengan USG OIOS, Ms Ndiaye yang antara lain membahas tentang proposal anggaran 2022 dan isu *capacity gap* serta status rekomendasi OIOS yang telah ditindaklanjuti oleh manajemen. Pada diskusi ini juga membahas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, terutama 10-20 rekomendasi yang paling banyak.

Komite juga bertemu dengan Director of the Under-Secretary General, Department of Manage-



ment Strategy, Policy and Compliance (DMSPC), Ms Catherine Pollard. Kali ini, diskusi dilakukan mengenai status implementasi rekomendasi dalam *oversight body*. Terutama reviu atas tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh *board of auditors* serta membahas isu terkait Enterprise Risk Management (ERM), dan status atas *risk treatment and response plan*. Termasuk juga mengenai modul ERM dalam aplikasi Umoja.

Hal yang tak kalah penting adalah diskusi dengan Under-Secretary Generalatas Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) Mr Liu Zhenmin. Agenda pembahasannya yaitu diskusi atas laporan reposisi sistem pembangunan PBB dalam pemenuhan agenda SDGs 2030 secara terintegrasi dan efisien dalam pandemi Covid-19. Kemudian diskusi terkait *database* SDGs yang dikelola oleh UNDESA.

Melalui peran wakil ketua IAAC PBB, Indonesia dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama pengawasan di lembaga-lembaga di bawah PBB. Selain itu, Indonesia juga dapat berperan dalam memastikan kepatuhan manajemen atas hasil pengawasan dan rekomendasi dari *oversight body* lainnya. Dalam kaitannya dengan institusi, peran Wakil Ketua BPK sebagai Wakil Ketua IAAC PBB dapat meningkatkan citra BPK sebagai institusi dengan kompetensi yang diakui di kancah dunia internasional. ●



■ Sekjen BPK Bahtiar Arif bersama para peserta 36th Meeting of the Technical Group of External Auditors of the United Nations.



## BPK SAMPAIKAN DUA ISU PENTING TERKAIT LHP AUDITOR EKSTERNAL PBB

Perubahan situasi ekonomi global pun turut mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan pelaporan audit.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan dua isu penting dalam 36th Meeting of the Technical Group yang digelar pada Senin, 19 April 2021. Ini merupakan rangkaian dari Panel of External Auditors of the United Nations-the Specialized Agencies and the IAEA.

Pertemuan ini diselenggarakan secara virtual oleh UN Board and Panel of External Auditors Sekretariat yang bermarkas di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Pertemuan level teknis ini dilaksanakan dalam rangka berbagi pengalaman atas dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan audit lembaga PBB dan isu strategis dalam kegiatan audit tersebut.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif menyampaikan isu pertama, yaitu "Impact of Covid-19 on Financial Statement Disclosures and Financial Reports Arising from Audits-Case Study in IAEA". BPK berbagi pengalaman melakukan audit Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA) pada masa pandemi.

Dijelaskan, kebijakan pembatasan akibat pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan bagi pengungkapan laporan keuangan. Perubahan situasi ekonomi global pun turut mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan pelaporan audit. Terutama akun-akun yang mengandalkan situasi ekonomi seperti defisit kas, pendapatan investasi, dan kewajiban After Service Health Insurance (ASHI).

Isu kedua yang disampaikan yaitu "Uniformity of External Audit Reports in UN Organizations:

Challenges and Best Practice". Pemaparan dilakukan oleh Wakil Penanggung Jawab Tim Pemeriksa Eksternal IMO Yudi Ramdan Budiman. Isu ini menarik untuk dibahas karena pelaporan audit sangat penting dalam kegiatan audit.

Di PBB, terdapat dua tipe laporan audit, yaitu *short-form report* dan *long-form report* (LFR). Namun, dalam praktiknya tidak ada standar baku untuk bentuk dan isi dari LFR. Untuk itu, BPK berupaya mengangkat isu ini untuk mengembangkan *best practice* penyusunan LFR.

Penyeragaman bentuk dan isi LFR ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas LFR antara auditor eksternal di seluruh organisasi PBB. Peningkatan kualitas LFR akan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini *those charged with governance* (TCWG), negara anggota, dan auditor eksternal lainnya.

Dalam kesempatan ini, BPK juga diwakili oleh kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, kepala bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti, pengendali teknis Tim Pemeriksa Eksternal IMO Nanik Rahayu, pengendali teknis Tim Pemeriksa Eksternal IAEA Cipto Nugroho, ketua Tim Pemeriksa Eksternal IMO Endra Noviandy Sujadi, dan ketua Tim Pemeriksa Eksternal IAEA Uthar Mukthadir.

Selain BPK yang mewakili Indonesia, turut pula bergabung auditor eksternal badan PBB lain dari 13 negara, yaitu Chile, Cina, Filipina, Ghana, India, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Perancis, Rusia, Swiss, dan Tanzania. ●



United Nations

## ADI SUDIBYO, KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ADAPTIF DENGAN LINGKUNGAN

**B**ertugas di perwakilan BPK di berbagai daerah memiliki sejumlah tantangan. Kerinduan dengan keluarga di daerah asal serta perbedaan budaya harus bisa disikapi dengan positif agar tidak mengganggu pekerjaan. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Sudibyo bercerita tentang berbagai penempatan kerjanya mulai dari bertemu GAM di Aceh hingga ke NTT. Kepada *Warta Pemeriksa*, Adi juga berbagi harapannya terhadap BPK di masa yang akan datang. Berikut petikan wawancaranya.

### **Bagaimana kisah Bapak memulai karier di BPK?**

Saya bergabung di BPK pada tahun 1990 dimana waktu BPK dipimpin oleh Bapak M. Jusuf. Pada saat itu, kondisi BPK tentu sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Saya mengikuti tes di BPK, ketika pertama kalinya BPK membuka lowongan pemeriksa dengan latar belakang teknik, dan Alhamdulillah saat itu kami yang diterima sebanyak 2 orang.

PNS pada waktu itu tidak seperti saat ini. Sekarang sudah maju dan sudah serba enak. Dulu bisa dikatakan masih agak sulit. Kami masuk BPK pertama kali dengan penghasilan senilai Rp75 ribu per bulan. Penghasilan tersebut jauh lebih kecil dari pekerjaan saya sebelumnya.

Waktu itu, saya mau menjadi PNS karena pekerjaan di swasta masih kurang menjanjikan untuk jangka panjang dan saya juga ingin mengabdikan ke negara. Selain itu, saya sudah familier dengan lingkungan PNS karena kedua orang tua saya juga berprofesi sebagai PNS.

### **Di mana penempatan pertama Bapak setelah diterima bekerja di BPK dan bagaimana perjalanan karier setelah itu?**

Saya ditempatkan pertama kali di Kantor Pusat BPK pada Oditorat D, dimana Oditorat tersebut bertugas untuk memeriksa Kementerian PU. Dalam perkembangannya, Oditorat D berubah menjadi Auditorat Uta-

ma Keuangan Negara II saat ini menjadi Auditorat Utama Keuangan Negara IV.

Pada 1990, saya pertama kali ditugaskan sebagai anggota tim untuk pemeriksaan proyek irigasi di provinsi yang situasi keamanannya cukup genting yaitu Aceh. Waktu itu suasananya masih mencekam dan ketika kami melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan harus dikawal oleh Kopassus.

Saya bertugas mengaudit Kementerian PU cukup lama, sampai sekitar tahun 2000. Setelah itu, saya dimutasi Oditorat yang membidangi pemeriksaan atas APBD Provinsi DKI Jakarta, dimana penempatannya masih di Kantor Pusat, karena ketika itu belum ada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2001, saat BPK sedang melakukan pembukaan perwakilan di beberapa wilayah, saya mendapatkan mutasi promosi sebagai Kepala Seksi ke Perwakilan BPK RI di Palembang.

Saya bertugas di Palembang hingga tahun 2005 dan kemudian mendapatkan mutasi promosi ke Aceh sebagai Kepala Sub Auditorat (Kasubaud) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Ketika itu, BPK membuka perwakilan baru di Aceh dan kami termasuk pionir di perwakilan tersebut. Saat itu, di Aceh baru terjadi musibah tsunami.

Selain baru menghadapi musibah tsunami, kondisi perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) belum tercapai, sehingga, kami di lapangan masih sempat bertemu dengan personel GAM. Saya bertugas di Aceh hingga tahun 2007. Kemudian dimutasi ke Kantor Pusat menjadi Kasubaud di Auditorat Utama Keuangan Negara IVA.1 yang membidangi Kementerian PU dan bertugas hingga tahun 2010.

Di tahun 2010, saya mendapatkan mutasi



**Ketika kita memimpin suatu unit kerja kalau tidak didukung oleh jajaran unit kerja itu tentunya tidak akan ada keberhasilan. Kami mencoba menciptakan kondisi saling mengingatkan sehingga kawan-kawan juga bisa memahami satu sama lain.**

promosi sebagai Kepala Perwakilan (Kalan) pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sampai tahun 2013 dan kemudian dimutasi ke Kantor Pusat sebagai Kepala Auditorat VI.B sampai tahun 2015. Setelah itu, mulai tahun 2015 saya dimutasi menjadi Kalan pada beberapa perwakilan. Dimulai dari Kalan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Kalan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, dan Kalan BPK Perwakilan Provinsi Papua. Kurang lebih saya bertugas selama setahun-setahun pada ketiga perwakilan tersebut. Terakhir, saya dimutasi menjadi Kalan BPK Perwakilan Provinsi NTT pada 2019 sampai dengan sekarang.

**Prinsip apa yang Bapak pegang ketika memimpin suatu unit kerja atau organisasi?**

Manajemen kepemimpinan sangat penting. Ketika saya dipindahkan ke suatu tempat, hal pertama yang saya lihat adalah budaya atau kebiasaan di tempat itu.

Misalnya, secara eksternal ke pemerin-



■ Adi Sudibyo

tah daerah (pemda), saya selalu berusaha membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan daerah dan berupaya memberikan suatu informasi tentang cara kerja dan program BPK.

Secara internal, ini juga penting. Ketika kita memimpin suatu unit kerja, kalau tidak didukung oleh jajaran unit kerja, maka tidak akan ada keberhasilan. Kami mencoba menciptakan kondisi saling mengingatkan sehingga kawan-kawan juga bisa memahami satu sama lain.

Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman BPK untuk menghargai dan menghormati orang yang lebih tua. Baik itu kolega, *auditee*, atau bahkan orang yang pangkatnya lebih rendah dari kita. Menurut saya itu penting karena terkadang gaya komunikasi yang salah bisa menimbulkan masalah.

Bertugas di perwakilan BPK sering kali harus menghadapi budaya yang berbeda. Contohnya, ketika bertugas di Sumatera Selatan, budaya bahasanya berbeda sekali dengan apa yang saya pahami. Dalam komunikasi, mereka menyebut kita dengan menggunakan kata "kamu". Sebagai orang Jawa, ini rasanya tidak sopan. Tapi, setelah mendapatkan informasi dari kawan-kawan, ternyata penggunaan kata "kamu" itu merupakan sapaan yang sangat sopan di daerah tersebut. Jadi, kita memang harus tahu budaya suatu daerah juga.

Saya sering mengingatkan hal ini kepada teman-teman BPK di daerah. Budaya suatu daerah bisa berbeda dengan budaya yang kita bawa dari tempat asal kita. Ada pepatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi, di mana kita berada kita harus menyesuaikan dengan lingkungan itu.

Apalagi, di perwakilan ini banyak perantaraan yang sama-sama jauh dari tempat asal dan keluarga. Sebagai sesama perantau tentu yang perlu dijaga adalah kekompakan.

Hal ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Contohnya di BPK Perwakilan Provinsi NTT, kami membentuk komunitas-komunitas berdasarkan hobi-hobi pegawai seperti bersepeda, futsal, bulu tangkis, bola voli, dan motor. Selain itu, juga dilakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pembentukan panitia qurban pada hari raya Idul Adha dan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan lainnya seperti kunjungan ke panti asuhan dan kegiatan Jumat Berkah berupa penyediaan makan siang bagi jemaah di masjid yang telah ditentukan setiap hari Jumat.

Kami berupaya menciptakan suasana kebersamaan sehingga teman-teman merasa betah. Secara psikis, NTT ini bukan daerah favorit penempatan kerja. Tapi, apabila dinikmati, lama-lama jadi betah juga. Provinsi NTT terdiri banyak pulau yang memiliki banyak tempat wisata. Saya sarankan kepada para pegawai agar pada saat pemeriksaan, kita juga harus memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di NTT.

#### **Bagaimana Bapak melihat BPK di masa mendatang?**

Saya kira BPK sudah sangat berubah. *Take home pay* saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan PNS lain. Saya sering sampaikan kepada teman-teman BPK supaya dengan kesejahteraan yang semakin meningkat, kita harus juga meningkatkan



**Sekarang ini BPK sudah semakin mendunia. BPK bahkan bisa menjadi pemeriksa eksternal di lembaga kelas dunia. Ini juga saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada program beasiswa dan bisa juga menjadi auditor internasional.**

kinerja kita. Saya selalu tekankan kepada mereka agar memiliki komitmen kerja yang baik dan profesional.

Selain itu, sekarang ini BPK sudah semakin mendunia. BPK bahkan sudah menjadi pemeriksa eksternal pada beberapa lembaga internasional. Hal ini juga saya sampaikan ke teman-teman, untuk mengambil kesempatan baik menjadi pemeriksa internasional atau mengikuti program beasiswa internasional. Saat ini, satu orang pemeriksa dari Perwakilan NTT yang menjadi anggota tim pemeriksaan pada *International Maritime Organization* (IMO).

#### **Apa harapan Bapak terhadap BPK maupun BPK Perwakilan Provinsi NTT?**

Dinamika perubahan saat ini semakin cepat. Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang juga membawa perubahan menuju budaya kerja baru. Banyak hal yang tidak kita perkirakan sebelumnya, sekarang harus kita dilakukan. Dulu kita sering melakukan rapat-rapat ke Jakarta. Sekarang itu bisa dilakukan dengan konferensi video. Ini suatu perubahan yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi. Kami juga mendorong pihak *stakeholder* BPK untuk mengikuti perkembangan teknologi ini.

Harapan saya, BPK ke depan semakin maju dan terus menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemeriksaan, sehingga, pemeriksaan BPK akan lebih efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi masyarakat. ●

Mengikuti perkembangan di masyarakat, *Warta Pemeriksa* kini sepenuhnya menggunakan platform digital. Per Juni 2021, kami tidak lagi hadir dalam bentuk cetak. Pembaca dapat menikmati informasi yang kami sajikan melalui *Warta Pemeriksa Digital*. Kami juga tetap menawarkan pengalaman membaca majalah dalam format e-magazine yang dapat diakses dari laman resmi BPK dan *Warta Pemeriksa*.



## MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DENGAN *STAKEHOLDER*

Saat ini, pemda yang telah memperoleh opini WTP sebanyak 12 entitas dari total 23 entitas.

**K**etika pertama kali bertugas di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2019, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT Adi Sudibyo mengatakan, baru dua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di wilayah tersebut yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adi pun berupaya membangun pola komunikasi dengan pemangku kepentingan atau stakeholder agar bisa menemukan masalah yang ada dan mencari solusinya.

“Mereka (pemda) menganggap permasalahan itu tidak akan pernah bisa selesai. Ada banyak daerah yang sudah bertahun-tahun meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” ujar Adi kepada *Warta Pemeriksa*, Senin (10/5).

Dengan pendekatan komunikasi tersebut, Adi mengajak pemda mencari solusi dari permasalahan yang ada. Saat ini, pemda yang telah memperoleh opini



WTP sebanyak 12 entitas dari total 23 entitas.

“Ini masalahnya apa? Ternyata sebagian besar terkait masalah aset. Kita coba mengedukasi bahwa permasalahan itu bisa diselesaikan,” ujar Adi.

Adi mengatakan, pihaknya saat ini berupaya melakukan pemeriksaan kinerja dengan tema yang mampu mendorong pemda bisa semakin maju. Pada dua tahun lalu, ujarnya, BPK Perwakilan Provinsi NTT melakukan pemeriksaan terkait aset yang dimanfaatkan pihak ketiga. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa hal itu kurang memberikan kontribusi kepada pemda, sehingga BPK memberikan beberapa rekomendasi perbaikan atas hal tersebut.

Menurut Adi, rekomendasi BPK tersebut diterima dengan positif oleh pemda. Hal itu pun menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan aset.

NTT merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang sangat bagus. Pada saat ini, Pemerintah NTT sedang membuat program-program pengembangan daerah-daerah pariwisata tersebut.





**Alhamdulillah sampai saat ini, pegawai BPK di NTT yang terkonfirmasi Covid-19 tidak terlalu banyak. Ini semua karena kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat.**

Adi mengatakan, BPK pun berusaha mendukung program tersebut dengan melakukan pemeriksaan kinerja dan memberikan saran perbaikan. BPK dhi. Auditorat Utama Keuangan Negara VI sudah menetapkan tema pemeriksaan tematik lokal terkait pariwisata yang dilaksanakan oleh Perwakilan Bali, NTB, dan NTT. Pemeriksaan itu akan dilakukan pada semester II tahun ini.

Selain pada pemeriksaan, pada masa pandemi Covid-19 ini, BPK Perwakilan Provinsi NTT terus berupaya melakukan beberapa inovasi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Adi mengatakan, BPK Perwakilan NTT menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Seluruh pegawai BPK yang baru saja kembali dari luar daerah harus melaksanakan WFH sekaligus karantina selama 3 s.d. 5 hari dan setelah itu baru dilakukan *rapid test*. Jika hasilnya negatif, pegawai tersebut baru dapat diizinkan untuk melaksanakan WFO.

“Alhamdulillah sampai saat ini, pegawai BPK di NTT yang terkonfirmasi Covid-19 tidak terlalu banyak. Ini semua karena kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.

Bagi tamu-tamu yang akan datang ke kantor perwakilan, BPK Perwakilan Provinsi NTT mewajibkan untuk menunjukkan hasil test negatif Covid-19 dengan jangka

waktu tes minimal 1x24 jam. Selain itu, BPK Perwakilan NTT juga menyiapkan alat tes Covid-19 berupa Saliva Tes dan Genose bagi para tamu yang datang ke BPK Perwakilan Provinsi NTT.

“Itu upaya preventif kami,” ujarnya.

Selain upaya preventif bagi para tamu. BPK Perwakilan Provinsi NTT telah menyiapkan 1 rumah untuk isolasi mandiri bagi para pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Tempat tersebut terutama diperuntukkan bagi para pegawai yang tinggal di mess, agar tidak menularkan ke pegawai lainnya.

Selain itu, Klinik BPK Perwakilan NTT sudah terhubung dengan aplikasi e-HAC dari Kementerian Kesehatan. Hal ini memudahkan bagi pegawai yang akan melaksanakan tugas dapat melakukan pemeriksaan di kantor sendiri tanpa perlu ke klinik lain.

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI), berdasarkan penilaian Tim Penilai Internal, BPK Perwakilan Provinsi NTT telah layak diajukan ke penilaian nasional Pembangunan ZI untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Walaupun BPK Perwakilan NTT baru mengajukan penilaian untuk WBK, namun kami sering diundang oleh instansi vertikal lain untuk berbagi ilmu terkait pencapaian WBK,” ujarnya. ●



■ Dadang Ahmad Rifai

## MELINDUNGI PEGAWAI DENGAN TABUNGAN PNS

Pegawai didaftarkan ke PT Taspen sejak masih menjadi CPNS.

**B**ekerja sebagai pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan bukan berarti tanpa bahaya. Sebagai pegawai negeri sipil, maka setiap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tabungan hari tua yang di dalamnya memiliki jaminan kecelakaan kerja.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemeriksa Keuangan Dadang Ahmad Rifai mengatakan Tabungan PNS yang dikelola oleh Negara yang dilaksanakan oleh PT Taspen terdiri dari Tabungan Hari Tua (THT), Dana Pensiun, beserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM). Di samping itu juga ada tabungan untuk Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Tabungan ini dipotong dari gaji PNS setiap bulan, ditambah dengan iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah selaku



youtube.com-taspen

pemberi kerja.

“Besaran potongannya adalah 3,25 persen untuk THT dan 4,75 persen untuk dana pensiun, dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga. Untuk iuran BPJS Kesehatan, ditetapkan sebesar 1 persen dari Gaji dan Tunjangan Kinerja (maksimal total Gaji dan Tunjangan Kinerja adalah sebesar Rp12.000.000),” ucap dia kepada *Warta Pemeriksa*.

Sebenarnya, selain tabungan PNS ada pula Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), peralihan dari Tabungan Perumahan (Taperum). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, besaran simpanan adalah 3 persen, di mana dari peserta sebesar 2,5 persen dari gaji (PNS), dan ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen.



**Besaran potongannya adalah 3,25 persen untuk THT dan 4,75 persen untuk dana pensiun, dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga. Untuk iuran BPJS Kesehatan, ditetapkan sebesar 1 persen dari Gaji dan Tunjangan Kinerja (maksimal total Gaji dan Tunjangan Kinerja adalah sebesar Rp12.000.000).**

Dana tersebut akan dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERERA) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Taperera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta melalui keterpaduan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

Saldo Taperum PNS aktif yang sudah terkumpul selanjutnya dikelola oleh BP Taperera. Untuk pegawai aktif, pengajuan fasilitas Taperera masih menunggu aturan pelaksanaan Taperera.

Bagi PNS yang telah pensiun namun belum cair Taperumnya karena peralihan Taperum menjadi Taperera, telah dibayarkan oleh Taperera bekerjasama dengan PT Taspen. Pengembalian dana Taperum Tahap pertama sudah dilakukan mulai tanggal 19 Januari 2021 dan Tahap ke II pada tanggal 10 Maret 2021, berdasarkan pengumuman TAPERERA. No.3/PENG/BP-TPR/II.1/03/2021.

Terkait tabungan hari tua, Dadang mengatakan pemotongan iuran termasuk Dana Pensiun, JKK-JKM sebesar 8 persen dari Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga (3,25 persen untuk THT dan 4,75 persen untuk dana pensiun), juga dilakukan sejak pegawai diangkat menjadi CPNS. THT dibayarkan sekaligus oleh PT Taspen saat PNS pensiun/berhenti, sementara Dana Pensiun dibayarkan setiap bulan setelah PNS pensiun.

Skema pembiayaan dana pensiun yang diterapkan oleh Pemerintah hingga saat ini adalah "pay as you go", yang dapat diartikan pendanaan langsung oleh pemerintah. Dalam skema ini pegawai dipotong gajinya untuk pembayaran iuran dana pensiun setiap bulan, lalu ketika pensiun nanti pemerintah akan membayar uang pensiun melalui PT Taspen.

Besaran uang pensiun setiap bulan adalah maksimal 75 persen dari gaji pokok terakhir, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai.

Hanya saja dalam skema baru "fully funded", menggunakan pola iuran pasti, yaitu terdapat iuran yang ditetapkan di awal yang harus dibayarkan bersama antara PNS dengan pemerintah selaku pemberi kerja. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan dengan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulan. Dari iuran yang dibayarkan oleh PNS dan pemerintah setiap bulan dilakukan pengembangan yang akan menentukan besar dana pensiun yang diterima. "Skema ini masih dalam pembahasan dan belum diterapkan sampai saat ini," ucap dia.

Dadang juga menyampaikan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN, Pemerintah melalui PT. Taspen menanggung berbagai kecelakaan kerja dan kematian yang dialami ASN. Tanggungan itu termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja berupa perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan santunan dan tunjangan cacat. Sedangkan JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. ●



youtube.com-taspen

## MEMASAK BUTUH KETEKUNAN

Bagi Sri Mulyani, masakan yang paling sulit adalah masakan nusantara.



**D**i kalangan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sri Mulyani merupakan salah satu sosok yang dikenal sangat gemar dan piawai dalam memasak. Keterampilannya dalam memasak tak diraih begitu saja, melainkan melalui ketekunan dalam belajar dan menjajal berbagai resep.

Staf Sekretariat Subbag Ketatausahaan AKN III BPK ini menceritakan, kecintaannya dalam memasak datang dari kehidupan di rumah masa kecilnya di Bandung, Jawa Barat. Dahulu, ia dan ketujuh saudaranya biasa menyantap beragam masakan sang ibu.

Ia mengaku latar belakang sang ibu selalu memasak makanan sendiri karena faktor anggota keluarga di rumahnya cukup banyak. Keinginan untuk berhemat dan menyiasati pengeluaran dapur, mendorong sang ibu yang bernama Sani Rochmah, selalu membuat makanan, baik sarapan hingga makan malam dengan tangan sendiri.

Semenjak membuat MPASI, Sri pun mulai mencoba-coba belajar membuat makanan, yang pertama adalah kue. Tak hanya sekadar

lewat media youtube atau mencari-cari di google, Sri juga mulai mengikuti kelas memasak.

Ia mulai mengikuti kelas memasak sejak 2014, tepatnya di Toko Loyang Natural Cooking Club. Ia juga mengikuti beberapa kelas memasak lainnya untuk melatih kemampuan membuat kue dan bahkan gelato.

"Ada tempat kursus yang memang di atas Rp1,5 juta pelatihannya hanya saja menyajikan menu-menu yang jarang dimiliki kursus lain. Walaupun mahal saya justru ingin tahu saja, ingin ikut kelas. Misalnya membuat gelato," ucap dia.

Selain mengikuti kelas memasak, rasa ingin tahu Sri Mulyani tentang resep makanan juga ia "curi" dari sang ibu. Beberapa masakan sang ibu, menurut dia, sangatlah juara dan rasanya bahkan lebih enak dari menu restoran. Ia mencontohkan seperti rendang, perkedel kentang hingga ayam goreng.

"Saya baru setahun dua tahun ini belajar membuat rendang, kebetulan kalau mama saya mungkin karena bakat jadi dia selalu bilang kira-kira. Saya belajar rendang pun akhirnya ikut kelas memasak. Dulu waktu mulai memasak, sering berantem, kalau bertanya lewat telepon dengan ibu saya, karena masakan mama saya selalu disebut ya kira-kira," ujar dia.

Sayangnya menurut dia, tidak semua resep berhasil ia raih dari sang ibu yang juga memiliki usaha catering. Hal itu karena sang ibu meninggal tepat 19 April lalu.





### Memasak semua jenis

Sri Mulyani mengaku pernah mencoba berbagai jenis masakan, mulai dari Western, Asia Timur, Timur Tengah hingga Nusantara. Ia menyebut akan mencoba setiap masakan dengan mencari resepnya. "Korea, Jepang, Timur Tengah kemudian cari bumbunya, kalau tidak ada saya *googling* bahan pengganti. Western juga kadang *nyoba* juga," katanya.

Hanya saja, bagi Sri yang paling sulit adalah memasak masakan nusantara. Meski saat ini ia mengaku masih terus mencoba, namun salah satu chef panutannya adalah Yongki Gunawan yang sering kali memberikan resep nusantara. "Nusantara itu, bahkan dalam membuat soto itu tiap daerah berbeda. Bahkan di nusantara dengan bahan paling sedikit dan mudah dicari ternyata dibuatnya termasuk susah. Salah satunya misalnya Soto Seger Boyolali, bumbunya cuma bawang merah, putih, pala, merica, daun salam dan daun bawang," ujar dia.

Sambil terus mengasah kemampuan memasaknya, Sri Mulyani pun mulai membuka usaha, yang ia sebut masih kecil-kecilan. Usaha Mom-knows Home Made ia mulai pada lebaran tahun lalu dengan pelanggan pertama adalah teman-teman di BPK dan teman kantor suami. Menunya mulai dari Avocado Mousse hingga Es Puter.

Namun produknya bukan sembarang es puter karena benar-benar menggunakan bahan-bahan alami, bahkan tanpa perasa dan pewarna. Sementara untuk kue ia berhasil menemukan resep tepat hingga akhirnya ia luncurkan sebagai produk.

"Cari resep itu harus pakai *feeling*, kadang ini bisa *deh* dipakai, atau ini kurang dan lain, bahannya pun harus sesuai dengan resepnya. *Brown sugar* pun misalnya tidak bisa diganti dengan *palm sugar*," tutur dia.

Sementara untuk produk pistachio *pudding*, ia menggunakan pasta pistachio asli yang biasa untuk membuat gelato dan kacangnya tanpa ada tambahan gula atau pewarna lainnya. Seluruh produknya ia jual lewat *online* dan dari mulut ke mulut. Ia memiliki instagram @mom-knowshomemade dan GOODIE\_MEE.

Di akhir cerita, ia meminta siapapun tidak patah semangat dalam mencoba atau baru memulai memasak.

"Jangan takut untuk mencoba resep, jangan pantang menyerah, karena memasak mungkin enak, kemudian berikutnya tidak enak. Tidak pernah patah semangat mencoba resep baru, intinya jangan mudah menyerah. Siapa tahu kalau orang sudah suka bisa menjadi cara untuk meraup uang. Bisa mengikuti kelas-kelas, memang ada harga yang harus kita bayar untuk meraih rahasia resep yang tidak ada di mana-mana," ujar dia. ●



**Tidak pernah patah semangat mencoba resep baru, intinya jangan mudah menyerah. Siapa tahu kalau orang sudah suka bisa menjadi cara untuk meraup uang.**



## WTP TAK BERARTI BEBAS MASALAH



■ Bahrullah Akbar

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

**O**pini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan suatu entitas bukan berarti tidak ada permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan entitas tersebut. Kendati demikian, permasalahan yang ditemukan secara material tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Hal itu seperti opini WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Meski memberikan opini WTP, BPK menemukan sejumlah permasalahan yang harus secepatnya ditindaklanjuti Pemprov Sumbar.

Penyerahan LHP atas LK Pemprov Sumbar Tahun 2020 dilakukan Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (7/5). "Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut, tidak material dalam memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan," kata Bahrullah saat menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi dan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.

Anggota V BPK mengungkapkan, beberapa permasalahan signifikan yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu, pembayaran kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Jaringan pada Dinas Pendidikan Sebesar Rp516,79 juta tidak sesuai ketentuan. Kemudian, pengadaan barang untuk Penanganan Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp12,47 miliar tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan lainnya, mekanisme penetapan Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) melalui Surat Keputusan Gubernur pada Biro Umum tidak sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, Anggota V BPK mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan peran BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK terus berupaya agar laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan.

“Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun ini ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya, BPK secara bersamaan juga melakukan pemeriksaan kinerja atas program Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Bangunan, yang menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah di Tahun 2020,” paparnya.

Bahrullah menjelaskan, pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas pembangunan infrastruktur gedung dan bangunan dalam rangka mendukung tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur dan masyarakat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada kesempatan ini, Anggota V juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 guna memberikan dorongan bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagi DPRD, IHPD ini dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, sehingga akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel.

IHPD yang disampaikan memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020.

Anggota V BPK mengingatkan, Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomen-



■ Penyerahan LHP atas LK Pemprov Sumbar Tahun 2020.



■ Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah

si laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

“Perlu kami sampaikan, bahwa sebelum LHP ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi rekomendasi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel,” tutupnya.

Acara penyerahan LHP ini turut dihadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Auditor Utama Keuangan Negara V Akhsanul Khaq, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Yusnadewi, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan para pimpinan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. ●

## BPK AJAK AKADEMISI LAKUKAN RISET KEUANGAN NEGARA

BPK berupaya menjadi katalisator penelitian keuangan negara dengan turut memublikasikan hasil penelitian ilmiah melalui Jurnal Taken.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2015 telah menerbitkan Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara (Jurnal Taken). Jurnal tersebut diciptakan sebagai bentuk partisipasi aktif dan kontribusi BPK dalam pengembangan pengetahuan dan praktik tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. BPK pun mengajak para akademisi untuk melakukan riset mengenai keuangan negara dan memublikasikannya di Jurnal Taken.

Hal tersebut disampaikan Anggota V/Pimpinan Keuangan Negara V BPK Bahrullah Akbar dalam webinar bertajuk "Mendorong Peran Dunia Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara Melalui Karya Tulis Ilmiah", Jumat, (5/5).



Jika merujuk pada tema keuangan negara, sampai dengan tahun 2021 hanya terdapat 4 jurnal yang terdaftar dalam SINTA yang secara eksplisit fokus pada bidang keuangan negara, salah satunya adalah Jurnal Taken yang dikelola BPK.



■ Bahrullah Akbar



■ Nizam



■ Gunarwanto

Webinar ini dipandu Kepala Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PKN BPK, Gunarwanto, serta mengundang Dirjen Dikti Kemendikbudristek, Nizam; Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual BRIN, Heri Hermansyah; dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani.

Bahrullah menjelaskan, Jurnal Taken merupakan media publikasi penelitian dalam bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara dalam lingkup akuntansi dan audit sektor publik, tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, dan administrasi publik terkait keuangan negara dan hukum keuangan negara.

Di dunia internasional, kata Bahrullah, organisasi 'BPK' Sedunia yaitu INTOSAI dan organisasi 'BPK' se-Asia yaitu ASOSAI, masing-masing memiliki satu jurnal sebagai media publikasi. INTOSAI memiliki the International Journal of Government Audit yang diterbitkan setiap tiga bulan. Sedangkan ASOSAI memiliki the Asian Journal of Government Audit yang diterbitkan setiap dua tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Jurnal Taken diharapkan menjadi salah satu jurnal internasional di bidang tata Kelola dan akuntabilitas keuangan negara yang bereputasi, yang dapat membantu mengembangkan sistem audit yang efektif, menjadi forum berdiskusi, dan menyebarkan praktik terbaik bagi komunitas BPK sedunia.

Dalam kesempatan tersebut, Bahrullah mengingatkan bahwa perguruan tinggi memiliki tugas yang disebut dengan Tri Dharma. Salah satu tugas utama mahasiswa adalah melakukan riset dan pengembangan inovasi serta pengembangan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk menghasilkan dampak yang berarti, hasil temuan suatu penelitian harus diketahui masyarakat.

Ia mengatakan, jurnal menjadi salah satu media untuk memublikasikan penelitian. Saat ini, ujar Bahrullah, publikasi penelitian dan pengelolaan jurnal menjadi barometer kinerja suatu lembaga keilmuan, baik lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, maupun organisasi profesi seperti BPK.

"Adapun jurnal yang dikelola oleh BPK, yaitu Jurnal Taken merupakan salah satu dari 286 jurnal di bidang ekonomi dan keuangan yang berada di posisi SINTA (Science and Technology Index) 2. Jika merujuk pada tema keuangan negara, sampai dengan tahun 2021



■ Heri Hermansyah



■ Mohammad Ali Ramdhani

hanya terdapat 4 jurnal yang terdaftar dalam SINTA yang secara eksplisit fokus pada bidang keuangan negara, salah satunya adalah Jurnal Taken yang dikelola BPK," kata Bahrullah.

Menyadari hal tersebut, BPK sebagai salah satu *stakeholder* utama dalam pengelolaan keuangan negara, berupaya mendorong dunia pendidikan tinggi untuk lebih berkiprah dalam pendidikan di bidang keuangan negara. "BPK berupaya menjadi katalisator penelitian keuangan negara dengan turut memublikasikan hasil penelitian ilmiah melalui Jurnal Taken maupun memfasilitasi sumber referensi penelitian melalui perpustakaan riset keuangan negara," ujarnya.

Terkait sumber referensi penelitian, Bahrullah menyampaikan bahwa BPK memiliki perpustakaan riset untuk mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara dengan menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik. Perpustakaan riset BPK memiliki 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul. ●



■ Ketua BPK RI



■ Para Pimpinan BPK RI

## BPK MATANGKAN PENYUSUNAN BUKU "MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA PASCA COVID-19"

Penyusunan buku *foresight* BPK bertujuan agar kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan memiliki pertimbangan dari berbagai perspektif.

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Webinar Seri I bertajuk "*Scenario Planning, Dampak, dan Proyeksi di Berbagai Bidang pada Masa dan Pasca-pandemi Covid-19*". Webinar tersebut digelar untuk menjangkir masukan yang dibutuhkan dalam mendukung penyusunan buku "*Indonesia Remade by Covid-19: Scenarios, Opportunities, and Challenges for Resilient Government*" atau "*Membangun Kembali Indonesia Pasca Covid-19: Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh*".

BPK telah melakukan peran *oversight* dan *insight* melalui pemeriksaan, kajian, dan pemberian rekomendasi signifikan untuk perbaikan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan peran *foresight* akan diwujudkan melalui penyusunan buku tersebut. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, penyusunan *foresight* BPK memiliki arti penting dalam

meningkatkan nilai tambah dan manfaat dari peran BPK sesuai rencana strategis (Renstra) BPK 2020-2024.

"Pembangunan kapasitas *foresight* melalui penyusunan buku *foresight* BPK merupakan salah satu *milestone* penting untuk menjadikan BPK semakin tangguh dan tepercaya di tengah ketidakpastian yang tinggi," kata Agung pada pembukaan webinar di Jakarta, Selasa (27/4).

Agung menyampaikan, penyusunan buku *foresight* BPK bertujuan agar kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan memiliki pertimbangan dari berbagai perspektif. Dengan demikian, akan dicapai sasaran yang dikehendaki dan berjalan secara efektif, akuntabel, dan memenuhi aspek transparansi.

Buku *foresight* BPK akan disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi penting yang telah dilakukan oleh BPK secara independen dan obyektif. Selain itu, buku *foresight* BPK juga didukung dengan perspektif atau proyeksi berbagai alternatif skenario jangka panjang atas kondisi, tren, serta



Kita bisa melihat seluruh proses bisnis yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke baik dari sisi eksekutif, legislatif, yudikatif. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang bersifat agregasi.



■ Wakil Ketua BPK memberi paparan.

dinamika yang terjadi, baik di Indonesia maupun dunia dengan dibantu oleh para narasumber yang kredibel baik dari para pengambil kebijakan, pengamat, dan praktisi di berbagai bidang.

Kegiatan webinar ini juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, dan Anggota V BPK/Pimpinan

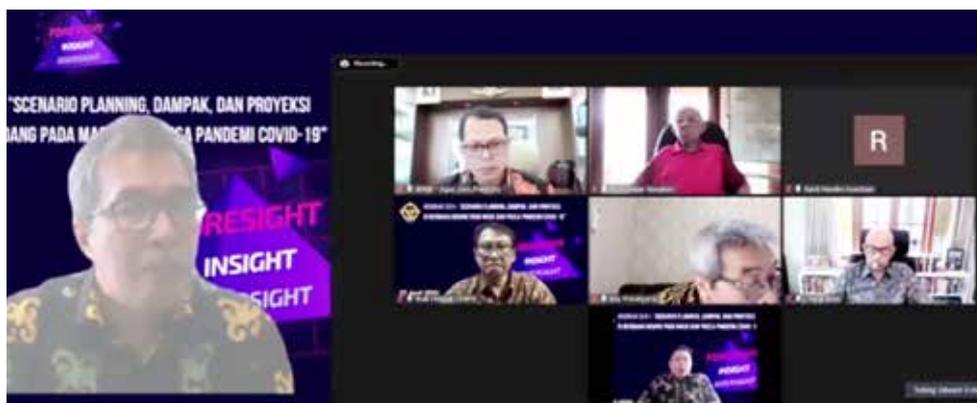
Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar.

Webinar tersebut diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pramatama, serta para pelaksana di lingkungan BPK pusat dan perwakilan. Dibagi menjadi tiga sesi, webinar ini menghadirkan 18 narasumber dari berbagai bidang yaitu panelis bidang *scenario planning*, bidang teknologi informasi (TI), *insight* dan *foresight*, keuangan dan perbankan, ekonomi, kesehatan, geopolitik, politik, sosial, lingkungan, teknologi, serta panelis bidang kesehatan.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, kontribusi *foresight* BPK sejalan dengan Intosai Maturity Model. Artinya, kedewasaan organisasi BPK bergerak dari sisi *oversight* menuju titik *foresight*. Di titik *foresight* atau di titik paling tinggi itu, BPK membantu *auditee* atau pemerintah untuk memberikan pilihan-pilihan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Agus, penting bagi BPK untuk memberikan kontribusi *foresight*. Hal ini karena BPK adalah satu-satunya organisasi yang bisa masuk memeriksa seluruh organisasi pengelola keuangan negara di Indonesia. BPK bisa masuk memeriksa tata kelola keuangan negara di sektor eksekutif, legislatif, yudikatif, dan organisasi non-eksekutif lainnya.

"Kita bisa melihat seluruh proses bisnis yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke baik dari sisi eksekutif, legislatif, yudikatif. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang bersifat agregasi," ujar Agus. ●



■ Suasana webinar

## BPK AJAK PEMANGKU KEPENTINGAN BAHAS PELUANG PJJ UNTUK ASN

Pendidikan merupakan satu tema yang menjadi perhatian dalam fokus pemeriksaan pada Renstra BPK 2020-2024.



■ Agung Firman Sampurna

**B**adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar *talkshow* virtual untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional pada Kamis (6/5). *Talkshow* tersebut mengusung tema “Peluang dan Tantangan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)”.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan, PJJ telah menjadi pilihan bagi ASN di masa pandemi Covid-19 untuk mengembangkan kompetensinya. Salah satu tantangan saat ini, ujarnya, pelaksanaan PJJ perlu dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mengingat sebaran ASN yang cukup luas pada wilayah dengan banyak universitas yang belum memiliki fasilitas PJJ.

“Tantangan penting terkait PJJ saat ini adalah bagaimana pemerintah mengambil kebijakan terkait penggalakan pembentukan program studi PJJ untuk pemerataan kompetensi masyarakat, khususnya terkait pengembangan kompetensi ASN di seluruh pelosok Indonesia,” kata Agung.

Agung menyampaikan, peluang peman-



faatan PJJ untuk pengembangan kompetensi cukup besar karena ASN semakin banyak diisi generasi muda. Berdasarkan data hingga Desember 2020, terdapat 70.338 ASN yang merupakan kelompok generasi Z. Generasi yang sering disebut *digital native* ini sudah terbiasa dengan keberadaan dan pemanfaatan teknologi sehingga sangat adaptif terhadap perkembangan era digital.

“PJJ dapat meningkatkan konektivitas dan menciptakan komunikasi yang lebih mudah, peserta didik dapat lebih masif, fleksibel secara waktu dan tempat, serta efektif dan efisien secara waktu dan biaya,” ujarnya.



■ Bahtiar Arif

Melalui PJJ, ASN di seluruh Indonesia pun memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga, diharapkan dapat tercapai pemerataan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan kompetensi ASN.

Agung menjelaskan, pendidikan merupakan satu tema yang menjadi perhatian dalam fokus pemeriksaan pada Renstra BPK 2020-2024. Beberapa hal penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan PJJ, lanjut Agung, di antaranya penguatan sistem penjaminan mutu, proses transisi budaya pembelajaran, kesenjangan kemampuan perguruan tinggi dalam implementasi PJJ, serta kolaborasi intra dan antar perguruan tinggi.

"Dengan semangat *Accountability for All*, kami berharap hasil pemeriksaan kami dapat membantu pemerintah dalam mendalami kebijakan dan masalah publik pendidikan," ungkap Agung.

Dalam *talkshow* yang dimoderatori oleh

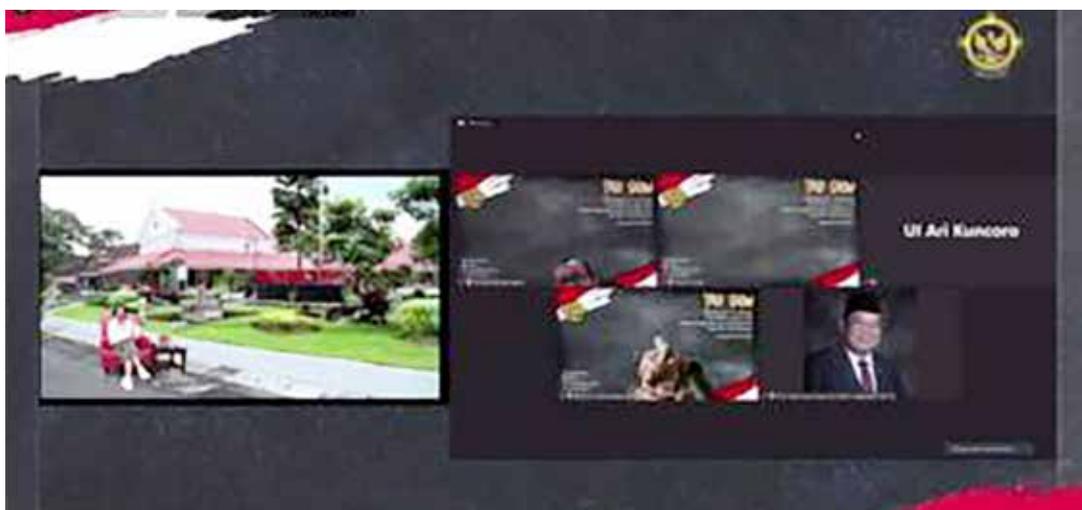
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti tersebut, turut hadir pembicara Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Harry Azhar Azis, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, dan Rektor Universitas Terbuka Ojat Darajat.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota VI BPK Harry Azhar Azis menyampaikan, persoalan yang ditemui ASN ketika sedang menempuh pendidikan. Menurutnya, terdapat permasalahan ketika ASN tersebut harus dimutasi sementara di saat bersamaan ASN tersebut sedang menempuh pendidikan. Menurut Harry, perlu ada penyesuaian peraturan dari kementerian dan lembaga terkait agar ASN memperoleh kesempatan lebih luas dalam meningkatkan kompetensi.

Selain itu, mutu dan kualitas penyelenggaraan PJJ perlu distandardisasi. "Di sini perlu mendapatkan perhatian, mutu dan kualitas PJJ itu siapa yang memberikan akreditasinya," ujar Harry.

Harry menekankan, koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan masih diperlukan untuk mendukung pelaksanaan PJJ. Terutama, pelaksanaan PJJ yang sampai memberikan gelar pendidikan kepada ASN. Hal ini karena berkaitan juga dengan manajemen pengelolaan ASN.

"Perlu dibahas aturan apa yang menghambat PJJ ini sehingga dengan demikian seluruh pegawai atau ASN semua bisa memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka di mana pun mereka berada," ujarnya. ●





■ OLEH WAHYUDI,  
KASUBAUD IV  
BPK PERWAKILAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

## PENYAJIAN INFORMASI BEBAN PENANGANAN PANDEMI COVID, POSISI UTANG, DAN KEBERLANGSUNGAN FISKAL PADA LK 2020 PEMERINTAH FEDERAL AS

Asumsi ekonomi dan demografis yang tidak mencerminkan efek pandemi Covid-19, meningkatkan ketidakpastian proyeksi fiskal jangka panjang tahun ini.

**P**ada 25 Maret 2021, US Department of Treasury merilis Laporan Keuangan Pemerintah Federal AS tahun 2020 yang telah diaudit oleh US Government Accountability Office (GAO).

Laporan Keuangan (LK) tersebut menyajikan gambaran umum komprehensif posisi dan hasil keuangan Pemerintah Federal AS, termasuk efek dari respons terhadap kondisi pandemi Covid-19 dan program dukungan senilai 2,6 triliun dolar AS bantuan langsung kepada warga, sektor, negara bagian dan pihak-pihak yang terdampak.

LK juga menyajikan tren jangka panjang utama yang memengaruhi keberlangsungan fiskal (*fiscal sustainability*) pemerintah AS. LK menyajikan dua laporan, yaitu *Accrual-based Financial Statement dan Sustainability Financial Statements*. Seperti 22 tahun terakhir, GAO mengeluarkan opini *disclaimer* (TMP) atas *Accrual-based Financial Statement* TA 2020 disebabkan kelemahan material tertentu dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan batasan lain pada lingkup pemeriksaan. GAO juga mengeluarkan opini *disclaimer* atas *Sustainability Financial Statements* karena ketidakpastian signifikan terkait pencapaian pengurangan yang diproyeksikan dalam pertumbuhan biaya Medicare dan batasan tertentu lainnya.

*Accrual-based Financial Statement* TA 2020 melaporkan biaya operasional bersih (*net operating cost*) akrual berjumlah

3,8 triliun dolar AS (ekuivalen Rp55.100 triliun, pada asumsi kurs rata-rata 1 dolar AS=Rp14.500). Defisit anggaran (*cash-basis*) dolar AS 3,1 triliun (ekuivalen Rp44.950 triliun). Selisih 696,9 miliar dolar AS antara defisit anggaran dan *net operating costs* sebagian besar disebabkan biaya yang masih harus dibayar, terutama terkait peningkatan perkiraan kewajiban *actuarial*, peningkatan piutang pajak, dan lain-lain.

Defisit anggaran tersebut meningkat 2,1 triliun dolar AS (218,2 persen) dari defisit 984 miliar dolar AS pada tahun 2019, dan *net operating cost* meningkat 2,4 triliun dolar AS (164,7 persen) dari 1,446 triliun dolar AS tahun 2019. Selama TA 2020, utang federal yang dimiliki publik meningkat 25 persen menjadi 21,1 triliun dolar AS (ekuivalen Rp305.950 triliun). Total aset 2020 sebesar 6,0 triliun dolar AS jika dibandingkan dengan total kewajiban 32,7 triliun dolar AS, maka terdapat posisi bersih ekuitas negatif sebesar 26,8 triliun dolar AS (ekuivalen negatif Rp388.600 triliun).

*Sustainability Financial Statements* menyajikan SLTFP (*Statements of Long-Term Fiscal Projections*) terkait *present value* (PV) pengeluaran non-bunga termasuk jaminan sosial, Medicare, Medicaid, pertahanan, dan pendidikan, dan lain-lain selama 75 tahun ke depan yang diproyeksikan melebihi PV total penerimaan sebesar 79,5 triliun dolar AS. Disajikan pula *Statements of Social Insurance* (SOSI) terkait PV pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial dan perawatan

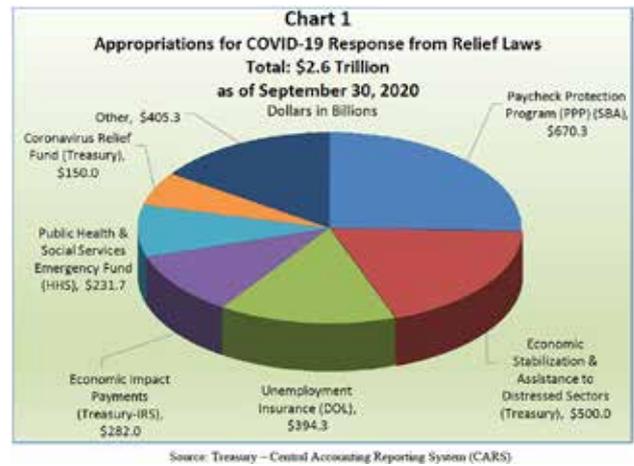
an kesehatan dan program asuransi sosial diproyeksikan melebihi PV pendapatan asuransi sosial sekitar 65,5 triliun dolar AS. Untuk mencegah peningkatan rasio utang terhadap PDB selama periode dimaksud, diperlukan langkah pengurangan belanja non-bunga dan peningkatan penerimaan rata-rata 5,4 persen dari PDB. *Fiscal gap* sebesar minus 5,4 persen menggambarkan 30,2 persen dari PV penerimaan dan 23,8 persen dari PV belanja non-bunga dalam kurun 75 tahun ke depan.

Adapun ringkasan data keuangan dimaksud adalah sebagai berikut:

	2020	2019*	Increase / (Decrease)	
			\$	%
<b>FINANCIAL MEASURES (Dollars in Billions)</b>				
Gross Cost	\$ (7,194.1)	\$ (5,287.2)	\$ 1,906.9	36.1%
Less: Earned Revenue	\$ 461.6	\$ 418.4	\$ 43.2	10.3%
Gain (Loss) from Changes in Assumptions	\$ (679.5)	\$ (198.9)	\$ 480.6	241.6%
Net Cost	\$ (7,412.0)	\$ (5,067.7)	\$ 2,344.3	46.3%
Less: Tax and Other Revenues	\$ 3,871.6	\$ 3,621.8	\$ (49.4)	(1.4%)
Unmatched Transactions & Balances	\$ 11.6	\$ 0.4	\$ 11.2	2,800.0%
Net Operating Cost	\$ (3,828.8)	\$ (1,446.3)	\$ 2,382.5	164.7%
Budget Deficit	\$ (3,131.9)	\$ (984.4)	\$ 2,147.5	218.2%
<b>Assets:</b>				
Cash & Other Monetary Assets	\$ 1,926.9	\$ 524.6	\$ 1,402.3	267.3%
Direct Loans and Loan Guarantees Receivable, Net	\$ 1,577.4	\$ 1,425.8	\$ 151.6	10.6%
Inventories & Related Property, Net	\$ 379.7	\$ 355.7	\$ 24.0	6.7%
General Property, Plant & Equipment, Net	\$ 1,145.0	\$ 1,106.9	\$ 38.1	3.4%
Other	\$ 921.7	\$ 579.0	\$ 342.7	59.2%
Total Assets	\$ 5,950.7	\$ 3,992.0	\$ 1,958.7	49.1%
<b>Liabilities:</b>				
Federal Debt and Interest Payable	\$ (21,082.9)	\$ (16,861.0)	\$ 4,221.9	25.0%
Federal Employee & Veteran Benefits Payable	\$ (9,409.3)	\$ (8,440.3)	\$ 969.0	11.5%
Other	\$ (2,251.7)	\$ (1,643.5)	\$ 608.2	37.0%
Total Liabilities	\$ (32,743.9)	\$ (26,944.8)	\$ 5,799.1	21.5%
Unmatched Transactions and Balances	\$ (3.1)	\$ (14.7)	\$ (11.6)	(78.9%)
Net Position	\$ (26,796.3)	\$ (22,967.5)	\$ 3,828.8	16.7%
<b>SUSTAINABILITY MEASURES (Dollars in Trillions)</b>				
<b>Social Insurance Net Expenditures:</b>				
Social Security (OASDI)	\$ (19.7)	\$ (16.8)	\$ 2.9	17.3%
Medicare (Parts A, B, & D)	\$ (45.7)	\$ (42.2)	\$ 3.5	8.3%
Other	\$ (0.1)	\$ (0.1)	\$ -	- %
Total Social Insurance Net Expenditures	\$ (65.5)	\$ (59.1)	\$ 6.4	10.8%
Total Federal Non-Interest Net Expenditures	\$ (79.5)	\$ (49.0)	\$ 30.5	62.2%
75-Year Fiscal Gap (Percent of Gross Domestic Product) <sup>1</sup>	(5.4%)	(3.8%)	1.6%	42.1%

### Efek Pandemi terhadap Posisi Keuangan

Sejak dinyatakan sebagai keadaan darurat nasional AS awal Maret 2020, Kongres mengesahkan serangkaian CARES Act untuk mengurangi beban keuangan pada warga negara dan lembaga terkait, meminimalkan kerugian bisnis dan pekerjaan, serta meningkatkan likuiditas sistem keuangan AS. Adapun pendanaan untuk program pemulihan dampak pandemi Covid sebesar 2,6 triliun dolar AS terdiri dari skema, pertama, 670,3 miliar dolar AS *Paycheck Protection Program* bagi usaha kecil untuk mempertahankan karyawan (tidak di-PHK)



melalui pengampunan hutang (*loan forgiveness*) pada pengeluaran untuk *payroll*, *benefit costs*, bunga hipotek, sewa, dan utilitas.

Kedua, 500 miliar dolar AS *Economic Stabilization and Assistance to Severely Distressed Sectors of the U.S. Economy*, berupa penyediaan pinjaman langsung dan jaminan pinjaman untuk berbagai bisnis dan pemerintah negara bagian dan lokal. Ketiga *Unemployment Insurance* 394,3 miliar dolar AS berupa skema dukungan untuk memperluas kemampuan negara bagian menyediakan kompensasi bagi pekerja yang terkena dampak pandemik.

Keempat, *Economic Impact Payment* 282 miliar dolar AS insentif pajak berupa pemberian kredit pajak yang dapat dikembalikan, *recovery rebate*, termasuk penangguhan pembayaran bagian perusahaan atas *Social Security taxes* hingga Desember 2020. Kelima, *Public Health and Social Services Emergency Fund* 231,7 miliar dolar AS untuk dukungan penggantian dana kepada entitas penyedia layanan kesehatan atas biaya atau pendapatan yang hilang yang disebabkan dampak pandemi, dan dukungan untuk pengembangan dan pembelian vaksin, perawatan, pengujian, dan perlengkapan medis.

Keenam, *Coronavirus Relief* sebesar 150 miliar dolar AS bantuan kepada negara bagian, lokal, dan *tribal* pemerintah suku untuk pengeluaran terkait pandemik. Ketujuh, 405,3 miliar dolar AS program pendanaan lainnya kepada lembaga dan program lain untuk bantuan sistem transportasi, lembaga pendidikan, dan dana bantuan bencana.

Adapun jumlah alokasi anggaran (*appropriation*), jumlah yang segera harus dicairkan (*obligations incurred*) dan jumlah yang telah disalurkan (*gross outlays*) per instansi/kementerian adalah sebagai berikut:

**Table 2: COVID-19 Response From Relief Laws**

Dollars in Billions	Appropriations*	Obligations Incurred **	Gross Outlays**
Paycheck Protection Program (PPP) (SBA)	\$ 670.3	\$ 532.3	\$ 525.9
Economic Stabilization & Assistance to Distressed Sectors (Treasury)	\$ 500.0	\$ 31.8	\$ 19.3
Unemployment Insurance (DOL)	\$ 394.3	\$ 358.0	\$ 345.5
Economic Impact Payments (Treasury-IRS)	\$ 282.0	\$ 274.7	\$ 274.7
Public Health & Social Services Emergency Fund (PHSSEF) (HHS)	\$ 251.7	\$ 141.7	\$ 106.1
Coronavirus Relief Fund (Treasury)	\$ 150.0	\$ 150.0	\$ 149.5
Other	\$ 405.3	\$ 301.9	\$ 199.2
<b>Total</b>	<b>\$ 2,633.6</b>	<b>\$ 1,790.4</b>	<b>\$ 1,622.2</b>

\*Source: Treasury - Central Accounting Reporting System (CARS)

\*\*Source: Treasury - Government-wide Treasury Account Symbol Adjusted Trial Balance System (GTAS)

Berikut ini adalah detail anggaran dan distribusi kementerian dari program dimaksud:

**COVID-19 Appropriations as of September 30, 2020**

(in billions of dollars)

	2020
Department of Treasury	975.0
Small Business Administration	751.8
Department of Labor	394.3
Department of Health and Human Services	250.4
Department of Agriculture	73.2
Department of Homeland Security	45.9
Department of Transportation	36.0
Department of Education	31.0
Department of Veterans Affairs	19.6
Department of Housing and Urban Development	12.4
All other entities	44.0
<b>Total COVID-19 appropriations</b>	<b>2,633.6</b>

- US Treasury Department menerima alokasi 975,0 miliar dolar AS. Jumlah ini termasuk 500 miliar dolar AS subsidi kredit investasi dan pinjaman untuk mendukung bisnis, negara bagian, dan kota yang mengalami kerugian akibat pandemi. Per 30 September 2020, US Treasury memiliki 107,9 miliar dolar AS investasi ekuitas pada *special purpose vehicle* (SPV) yang didirikan untuk meningkatkan likuiditas sistem keuangan AS. Kerugian bersih dari investasi SPV sebesar 4,5 miliar dolar AS masuk dalam *net cost* dari US Treasury. Pendanaan ini termasuk 32 miliar dolar AS bantuan kepada maskapai penerbangan dan vendornya untuk dukungan penggajian kepada pekerja penerbangan selama pandemi. *Net cost* termasuk 28,2 miliar dolar AS terkait dukungan ini.
- Alokasi *Small Business Administration* (SBA) 751,8 miliar dolar AS untuk program *Economic Injury Disaster Loan* berupa pinjaman kepada pemilik usaha kecil. Piutang pinjaman SBA meningkat 182,9 miliar dolar AS terutama dari program ini, dengan *net cost* 5,4 miliar dolar AS.
- Alokasi pada Department of Labor (DOL) 394,3 miliar dolar AS termasuk untuk program

FPUC (*Federal Pandemic Unemployment Compensation*) berupa tambahan tunjangan pengangguran mingguan 600 dolar AS), program PUA (*Pandemic Unemployment Assistance*) berupa tunjangan sementara bagi individu yang tidak memenuhi syarat tunjangan reguler atau jaminan konvensional pengangguran), program *Pandemic Emergency Unemployment Compensation* (klaim manfaat tambahan), program Kompensasi Jangka Pendek (alternatif selain PHK bagi pemberi kerja). *Net cost* terkait tunjangan pengangguran ini berjumlah 352,2 miliar dolar AS.

- Department of Health and Human Services (HHS) menangani 250,4 miliar dolar AS untuk PHSSEF (*Public Health and Social Services Emergency Fund*) guna membantu entitas penyedia layanan kesehatan dengan kompensasi biaya terkait perawatan kesehatan atau hilangnya pendapatan terkait pandemi; pinjaman dan hibah untuk usaha kecil, penyedia layanan kesehatan dan rumah sakit; dan pengujian Covid-19. *Net cost* HHS meningkat 115,2 miliar dolar AS terutama dari peningkatan PHSSEF. HHS juga memberikan uang muka program penanganan pandemi sebagai uang muka di neraca 103,6 miliar dolar AS.
- Department of Agriculture (USDA) menerima alokasi 73,2 miliar dolar AS untuk program pangan domestik termasuk Program Gizi Anak, *Supplemental Nutrition Assistance Program*, dan Program *Emergency Food Assistance*. *Net cost* USDA meningkat 49,9 dolar AS untuk kegiatan ini.
- Department of Homeland Security (DHS) menerima alokasi tambahan 45,9 miliar dolar AS, untuk respons dan pemulihan bencana besar domestik dan keadaan darurat yang mengganggu sumber daya negara bagian, terutama kompensasi hilangnya gaji kepada individu dan anggota komunitas kesukuan. Kenaikan *net cost* 49,7 miliar dolar AS di DHS terutama disebabkan oleh aktifitas penanganan ini.
- Department of Transportation (DOT) menerima 36,0 miliar dolar AS untuk pemeliharaan dan kelanjutan operasional dan bisnis sistem transportasi dalam menanggapi pandemi, termasuk Hibah Bantuan untuk Bandara dari Administrasi Penerbangan Federal. *Net cost* DOT meningkat 22,5 miliar dolar AS untuk aktivitas penanganan ini.
- Department of Education (DOE) menerima alokasi 31,0 miliar dolar AS program hibah



Saat ini, manajemen tidak dapat memperkirakan secara wajar potensi dampak pandemi Covid-19 pada proyeksi atau upaya *sustainability* lainnya yang mungkin signifikan.

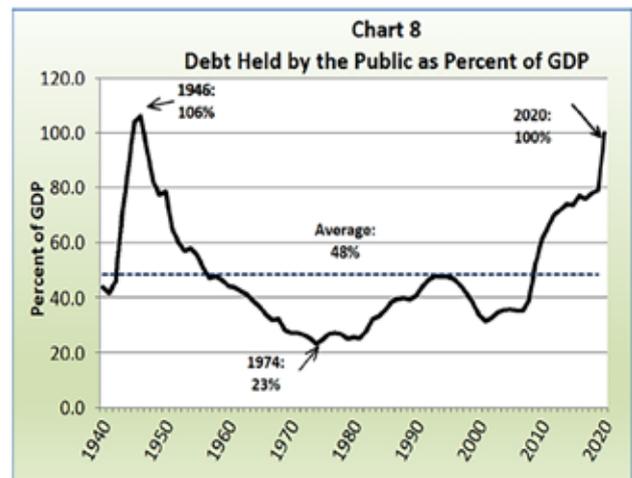
pendidikan, termasuk untuk mendanai perubahan kontrak penundaan pembayaran pendidikan siswa dan fasilitas penangguhan pinjaman pendidikan lainnya.

- Department of Veteran Affairs (VA) menerima alokasi 19,6 miliar dolar AS. Sebesar 18,6 miliar dolar AS digunakan untuk program layanan medis, TI, dan Medical Community Care. Pendanaan juga digunakan untuk akses para veteran memiliki ke peralatan *telehealth* dan perumahan darurat serta bantuan pencegahan tunawisma bagi keluarga veteran yang berpenghasilan sangat rendah. Kenaikan biaya kotor 21,6 miliar dolar AS di VA terutama disebabkan aktivitas ini.
- Department of Housing and Urban Affairs (HUD) mendapat alokasi 12,4 miliar dolar AS untuk Program Perencanaan dan Pengembangan Komunitas, Perumahan penduduk asli Indian; dan Perumahan untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas. Disediakan juga moratorium sementara penyitaan bagi hipotek yang dijamin pemerintah dan hak menahan pembayaran pinjaman bagi pemilik rumah yang mengalami kesulitan keuangan. HUD telah mencairkan 2,3 miliar dolar AS dari jumlah yang dialokasikan.

### Posisi Utang Pemerintah

Utang pemerintah federal yang dipegang publik terdiri dari *Marketable securities* (*Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds*), *Nonmarketable securities*, *Agency securities* dan utang bunga yang masih harus dibayar. Publik terdiri dari individu, perusahaan, pemerintah negara bagian dan lokal, Federal Reserve Banks, pemerintah asing, dan entitas lain di luar pemerintah federal. Sesuai *Public Debt Act* tahun 1941, Kongres dan Presiden menetapkan plafon batas *Treasury debt obligations* sebesar 65 miliar dolar AS untuk satu waktu.

Akan tetapi, Kongres dan Presiden menanggulkan batas utang hingga 31 Juli 2021. Setiap tahun, triliunan dolar utang jatuh tempo dan diterbitkan utang baru menggantikannya.

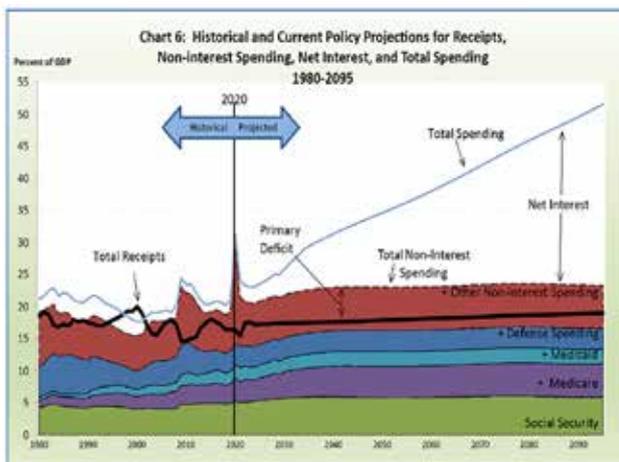


Pada TA 2020, pinjaman baru mencapai 19,0 triliun dolar AS, dan pembayaran utang jatuh tempo 14,8 triliun dolar AS. Utang federal yang dipegang/dimiliki publik meningkat 4,2 triliun dolar AS (25 persen) menjadi 21,1 triliun dolar AS (ekuivalen Rp305.950 triliun). Saat ini posisi utang federal yang seharusnya tunduk pada batas tersebut berjumlah 26,92 triliun dolar AS (ekuivalen Rp390.340 triliun). Posisi utang ini diukur dari persentase dari PDB. Rasio utang tersebut mencapai 100 persen dari PDB pada akhir TA 2020 (bandingkan dengan rasio 79 persen pada akhir TA 2019). Padahal sejak 1940, rata-rata rasio hutang terhadap PDB adalah 48 persen.

### Keberlangsungan Fiskal

Proyeksi fiskal jangka panjang pada *Sustainability Financial Statements* didasarkan pada asumsi ekonomi yang digunakan pada laporan *Social Security Trustees* dan digunakan pada data per 1 Januari 2020, sebelum terjadinya penurunan ekonomi. Saat ini, manajemen tidak dapat memperkirakan secara wajar potensi dampak pandemi Covid-19 pada proyeksi atau upaya *sustainability* lainnya yang mungkin signifikan. Asumsi ekonomi dan demografis yang tidak mencerminkan efek pandemi Covid-19, meningkatkan ketidakpastian proyeksi fiskal jangka panjang tahun ini.

*Fiscal-gap measure* mengukur seberapa besar defisit primer (*non-interest spending vs receipts*) harus dikurangi selama 75 tahun ke depan agar kebijakan fiskal *sustainable*. Perkiraan kesenjangan fiskal pada tahun 2020 adalah 5,4 persen dari PDB (dibandingkan dengan 3,8 persen untuk 2019). Perkiraan ini menyimpulkan bahwa membuat kebijakan fiskal berkelanjutan selama 75 tahun ke depan akan membutuhkan beberapa kombinasi pengurangan pengeluaran dan peningkatan penerimaan setara dengan rata-rata 5,4 persen dari PDB selama 75 tahun ke depan.



Kesenjangan fiskal ini adalah 30,2 persen dari *present value* (PV) penerimaan dan 23,8 persen dari belanja non-bunga PV dalam kurun 75 tahun. Rasio utang terhadap PDB pemerintah diperkirakan akan meningkat selama periode proyeksi 75 tahun dan seterusnya, jika kebijakan saat ini dipertahankan. Proyeksi menyimpulkan bahwa kebijakan saat ini tidak *sustainable*. Jika perubahan dalam kebijakan fiskal segera tidak dilaksanakan sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan jika perubahan kebijakan tersebut tidak diterapkan lebih awal, maka perubahan yang diperlukan pada pendapatan dan/atau pengeluaran semakin kecil untuk mengembalikan ke jalur fiskal yang *sustainable*.

GAO merekomendasikan rencana fiskal jangka panjang memperhitungkan aturan dan target fiskal, seperti target rasio utang terhadap PDB. Kongres harus menyelaraskannya dengan anggaran tahunan untuk penyusunan strategi yang konsisten. Akan tetapi, GAO juga memberi rekomendasi agar Kongres mempertimbangkan pendekatan alternatif terhadap atas utang saat ini. Karena batas utang bukan aturan fiskal, namun merupakan batasan pada otoritas keuangan

untuk meminjam guna mendanai keputusan yang telah ditetapkan oleh Kongres dan Presiden.

Kombinasi dari likuiditas, kedalaman, dan keamanan pasar surat utang pemerintah AS yang tidak tertandingi di pasar global membuat surat utang pemerintah AS menjadi investasi unik dan penting bagi investor. Banyak investor rela menerima imbal hasil rendah karena menganggap surat utang ini sebagai salah satu aset teraman di dunia. Pembatasan utang pemerintah akan mengancam kepercayaan investor pada surat utang Pemerintah AS. Ketidakpastian batas utang akan dinaikkan atau ditangguhkan akan menyebabkan peningkatan biaya pinjaman dan mengganggu pasar surat utang pemerintah federal AS.

### Kesimpulan

Pendanaan program pemulihan dampak pandemi Covid TA 2020 berjumlah 2,6 triliun dolar AS untuk 7 program pada 11 instansi/kementerian. Defisit anggaran TA 2020 adalah 3,1 triliun dolar AS. Posisi utang federal berjumlah 26,92 triliun dolar AS, dan rasio utang federal mencapai 100 persen dari PDB. Total aset 6,0 triliun dolar AS dan kewajiban 32,7 triliun dolar AS, sehingga posisi bersih ekuitas negatif sebesar 26,8 triliun dolar AS.

*Present value* (PV) pengeluaran non-bunga selama 75 tahun ke depan diproyeksikan melebihi PV total penerimaan 79,5 triliun dolar AS. PV pengeluaran Jaminan Sosial dan Perawatan Kesehatan dan program asuransi sosial diproyeksikan melebihi PV pendapatan asuransi sosial 65,5 triliun dolar AS. Diperlukan pengurangan belanja non-bunga dan peningkatan penerimaan rata-rata 5,4 persen dari PDB. *Fiscal gap* sebesar minus 5,4 persen menggambarkan 30,2 persen dari PV penerimaan dan 23,8 persen dari PV belanja non-bunga dalam kurun dimaksud. Proyeksi menyimpulkan bahwa kebijakan saat ini tidak *sustainable*.

GAO mengeluarkan opini *disclaimer* atas *Sustainability Financial Statements* disebabkan ketidakpastian signifikan pada asumsi yang dipergunakan manajemen, termasuk perkiraan dampak potensial dari pandemi Covid-19 sehingga laporan keuangan mungkin tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, informasi tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di AS. ●

**Sumber:** <https://www.fiscal.treasury.gov/reports-statements/financial-report/current-report.html>

## Definisi

# PENDAPAT BPK

- ✓ Pendapat BPK adalah penilaian, kesimpulan, dan rekomendasi BPK mengenai kebijakan dan/atau peraturan di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau hasil kajian yang dilakukan oleh BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, "BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain karena sifat pekerjaannya.
- ✓ Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

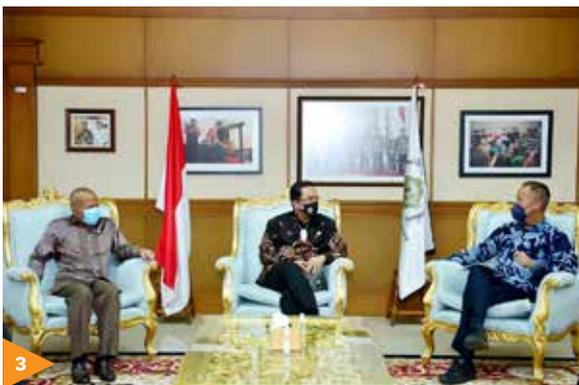
### Kriteria Pemberian Pendapat BPK

- a. Terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Makro, yaitu menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berdampak luas.
- c. Strategis, yaitu mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau menyangkut hajat hidup dan masyarakat banyak.
- d. Masif, yaitu permasalahan yang sering terjadi.
- e. Isu aktual, yaitu permasalahan yang sedang menjadi isu.
- f. Mendesak, yaitu penting untuk diselesaikan dengan segera.
- g. Relevan, valid, lengkap, serta dapat diolah lebih lanjut.

### Sumber Pendapat BPK

- a. Internal, yaitu pendapat yang bersumber dari inisiatif BPK.
  - b. Eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan pihak di luar BPK.
- ✓ Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan menjadi dua jenis:
    - a. Pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) oleh Direktorat EPP yang memenuhi kriteria pemberian pendapat.
    - b. Pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat (UBP).





**1-2**

Halalbihalal Pimpinan BPK RI dengan keluarga besar BPK yang diselenggarakan secara virtual, 18 Mei 2021.

**3**

Ketua BPK Agung Firman Sampurna didampingi Anggota II/Pimpinan Keuangan Negara BPK Pius Lustrilanang bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Ruang Rapat Ketua, 8 April 2021.

**4**

Pembahasan Pemeriksaan di Lingkungan AKN I dihadiri Anggota I/Pimpinan Keuangan Negara BPK Hendra Susanto di Jakarta, 26 April 2021.

**5**

Penyerahan LHP BPK atas LK KemenKop-UKM oleh Anggota II/Pimpinan Keuangan Negara BPK Pius Lustrilanang kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, 22 April 2021.



**6**  
Rakornis Kesenjangan dihadiri oleh Pimpinan BPK RI, 29 April 2021.

**7**  
Penyerahan LHP Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Kementerian Sosial oleh Anggota III/Pimpinan Keuangan Negara BPK Achsanul Qosasi kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, 27 April 2021.

**8**  
Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 oleh Anggota IV/Pimpinan Keuangan Negara BPK Isma Yatun kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda dan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, di Mataram, 18 Mei 2021.

**9**  
Anggota V/Pimpinan Keuangan Negara BPK Bahrullah Akbar menyerahkan LHP BPK atas LKPS Provinsi Lampung kepada Gubernur Arinal Djunaidi, 27 April 2021.

**10**  
Anggota VI/Pimpinan Keuangan Negara BPK Harry Azhar Azis menyerahkan LHP LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M. Kebing L dan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, 21 Mei 2021.





## Kuis

Pada majalah *Warta Pemeriksa* edisi Maret disebutkan bahwa sebagai salah satu Supreme Audit Institution (SAI) yang memiliki perhatian tinggi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyusun suatu laporan. Laporan apakah itu?



Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email [wartapemeriksa@bpk.go.id](mailto:wartapemeriksa@bpk.go.id) dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



# Semakin mudah mengakses informasi melalui...



**BPK RI Official**



**www.bpk.go.id**



**@bpkriofficial**



**@bpkri**



**08111907010**

BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.





Keluarga Besar BPK RI  
mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA  
IDULFITRI 1442 H

**Mohon Maaf  
Lahir dan Batin**

